**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Dapat dideskripsikan dengan lugas bahwa tugas dan kewajiban pemerintahan adalah membuat regulasi pelayanan umum, menciptakan dan menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat, memperkuat persatuan bangsa lewat pelestarian kultural kebangsaan, pengembangan dan pendewasaan berdemokrasi Pancasila, menciptakan keadilan dan mejaga rasa keadilan, pelestarian lingkungan hidup secara berimbang dan berkesinambungan, penerapan dan penegakan perundang-udangan, yang kesemuanya dimaksukaan untuk mengembangkan hidup berbangsa dan bernegara secara toleran dalam dalam kesetaraan hukum. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut maka diciptakan landasan pemerintahan yang bersih dan berwibawa yang merupakan hasil dari demokrasi yang jujur dan adil.

Kita ketahui bahwa dewasa ini, tuntutan tegas dari masyarakat demokratis adalah transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan sekaligus kinerja aparatus pemerintahan yang baik. Target tuntutan ini pada intinya adalah terselenggaranya tata kelola kepemerintahan yang baik (*Good Governance*), sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara bersih, bertanggungjawab dan memberikan dampak (*impact*) serta manfaat (*benefit*) dari hasil (*outcome*) yang diperoleh. Dengan alasan tersebut, maka pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dibuat sebagai bagian dari desain besar Reformasi Birokrasi untuk melaksanakan seluruh proses kepemerintahan dalam rangka merealisasikan tujuan bersama untuk mewujud-nyatakan *Good Governance.* SAKIP mengarahkan adanya sinergitas antara proses Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan sampai Evaluasi dan pemanfaatan informasi kinerja.

Pada kondisi terkini, evaluasi terhadap AKIP merupakan isu paling strategis dalam SAKIP karena pada akhir prosesnya akan dapat mencerminkan optimal atau tidaknya kinerja dari tiap-tiap lembaga/instansi pemerintah. Hal ini dapat memperlihatkan sejauh mana kemampuan instansi pemerintah dalam menerapkan manajemen kinerja yang berfokus pada hasil; pembangunan sistem, pengukuran, pengumpulan data kinerja dan pelaporan kinerja; perkembangan proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan program; serta perkembangan pelaksanaan kemajuan tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Akuntabilitas dapat didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. LAKIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai Kinerja dan mesin pendorong terwujudnya *good governance*. Dalam spektrum yang lebih luas, maka LAKIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga pemerintahan pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Pemerintah Kecamatan Pasilambena, dan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penyusunan LAKIP Tahun berdasarkan pada indikator *(inputs, Outputs,* *Outcomes dan Benefits)*, juga diatur mengenai metode, mekanisme dan tata carapelaporannya. Oleh karena itu laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kecamatan Pasilambena yang menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan oleh Camat kepada Bupati ini telah disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku. Realisasi yang dilaporkan dalam LAKIP ini merupakan hasil kegiatan Tahun Anggaran 2022.

**Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 ta hun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Taahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah D aerah Kabupaten/ Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Insstansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penyusunan LAKIP Tahun berdasarkan pada indikator *(inputs, Outputs,* *Outcomes dan Benefits)*, juga diatur mengenai metode, mekanisme dan tata carapelaporannya
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan .
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
15. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep/135/M. PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010-2030;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor Tahun 2006 tentang rencana Pembangunan Jangka Pandang (RPJP) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2006 - 2030.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2021.
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lebaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor 3).
22. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor Tahun 2008 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat.
23. **Maksud Dan Tujuan**
    1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah ini adalah untuk mempertanggungjawabkan pelaksaan tugas dan fungsi yang telah dicapai oleh instansi Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar pada Tahun Anggaran . Laporan Akuntabilitas Kinerja juga digunakan sebagai bahan evaluasi pelaksaan tugas dan fungsi pada tahun anggaran berikutnya. Oleh karena itu di dalam laporan ini disa jikan pula hasil pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan dengan menggunakan indikator yang telah ditetapkan sebagai parameter pengukuran kinerja.
    2. Tujuan disusunnya LAKIP adalah untuk:
       * Mendorong aparatur pemerintah kecamatan untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar (Good Governance) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebiijaksanaan yang akuntabel dan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat;
       * Membentuk Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kecamatan yang Akuntabel sehingga dapat melaksanakan tugas secara efisien, efektif, dan responsip terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya;
       * Sebagai *Feed Back/* umpan balik atas kinerja yang selama ini telah dicapai baik sebagai data koreksi/perbaikan atas kelemahan-kelemahan dalam pencapaian tujuan dalam rangka meningkatkan kinerja aparat se-Kecamatan Pasilambena;
       * Mempertanggungjawabkan kinerja Camat selaku perangkat daerah di kecamatan selama kurun waktu 1 tahun anggaran kepada Bupati.
24. **Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah**

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor Tahun 2016 tentang susunan organisasi, perincian tugas, fungsi, keudukan dan tata kerja kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar yang telah diatur melalui Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Kondisi umum Kecamatan Pasilambena saat ini digambarkan sebagai berikut :

1. Luas Wilayah : 114,88 km².

Luas wilayah tersebut merupakan wilayah daratan yang terdiri dari beberapa pulau kecil dengan keadaan tanah pada pulau kalaotoa berupa tanah berbatu dan sebagian bercampur dengan batuan kapur

1. Jumlah Penduduk : 7.700 Jiwa

* Laki-laki : 3.728 Orang
* Perempuan : 3.972 Orang

Dengan laju pertumbuhan penduduk 1.27 jiwa per Km ². Jumlah kk 2.039. Etnis budaya di Kecamatan Pasilambena secara garis besar digolongkan ke dalam etnis Selayar, Bugis, Makassar, etnis Bajo, Flores, dan etnis Buton di selayar yang lebih dikenal sebagai sub etnis Bonerate.

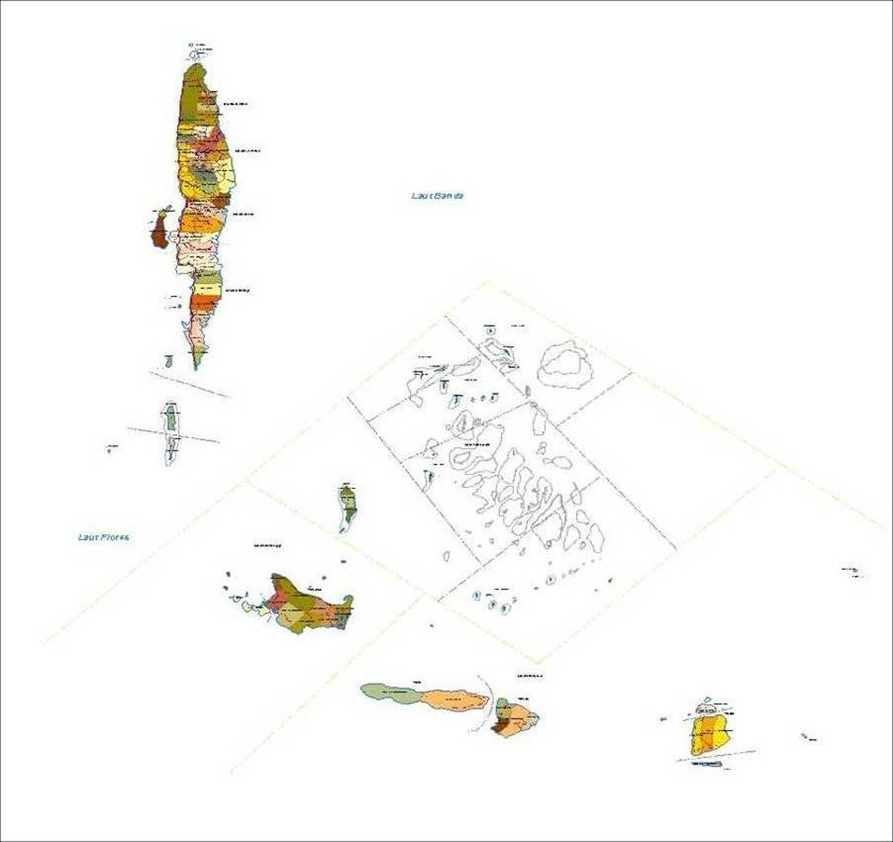
1. Batas Wilayah Kecamatan Pasilambena :

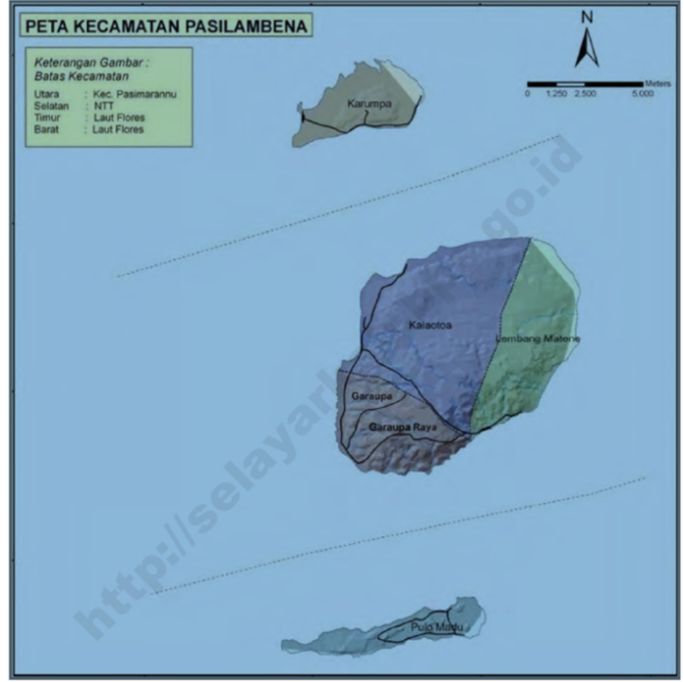
* Batas Utara : Peraiaran Teluk Bone
* Batas Timur : Laut Flores
* Batas Selatan : Laut Flores
* Batas Barat : Kecamatan Pasimarannu

1. Secara administratif wilayah Kecamatan Pasilambena meliputi 6 (Enam) Desa diantaranya 4 (Empat) Desa di daratan Ibu Kota Kecamatan dan 2 (Dua) Desa di Kepulauan :

* Desa Kalaotoa (Pulau Kalaotoa)
* Desa Lembang Matene (Pulau Kalaotoa)
* Desa Garaupa (Pulau Kalaotoa)
* Desa Garaupa Raya (Pulau Kalaotoa)
* Desa Pulo Madu (Pulau Madu)
* Desa Karumpa (Pulau Karumpa)

**Letak Daerah**





Koordinat :

7º22’4,49” LU - 121º47’35,02”BT

7,36667ºLS – 121,78333ºBT

Luas : 114.88 km² (39.76 mil²)

Zona Waktu : Waktu Indonesia Bagian Tengah / WITA (UTC+8)

Kecamatan Pasilambena terletak di posisi tenggara Kabupaten Kepulauan Selayar (Pulau Selayar merupakan pulau utama) yang merupakan wilayah kepulauan, dimana akses menuju Kecamatan Pasilambena ditempuh melalui laut dengan menggunakan Kapal Sabuk Nusantara 85, Kapal Ferry Penyeberangan ASDP, dan kapal motor perahu. Dari Ibu Kota Kabupaten Kepulauan Selayar dapat ditempuh antara 18 – 48 jam tergantung moda angkutan dan cuacu musim muson barat atau timur.

**Wilayah Kepulauan.**

Daerah pulau yang terdiri dari :

1. Pulau Kalahu dengan 4 desa di dalamnya, yaitu : Desa Kalaotoa, Desa Lembang Matene, Desa Garaupa, dan Desa Garaupa Raya.
2. Pulau Madu terdapat 1 desa, yaitu : Desa Pulo Madu.
3. Pulau Karumpa terdapat 1 desa, yaitu: Desa Kapumpa
4. Pulau Karumpa Kecil
5. Pulau Kaju Pangnga’ Besar
6. Pulau Kaju Pangnga’ Kecil
7. Pulau Kabauna
8. Pulau Kakabia
9. Wilayah kawasan Taka Lambena (jajaran terumbu karang) yang membentang dari Pulau Karumpa Kecil hingga ke kawasan Pulau Bunging Bekke’ di Kecamatan Taka Bonerate.

Kondisi georafis ini sangat potensial dikembangkan untuk industri perikanan, baik perikanan rakyat secara budidaya atau penangkapan maupun industry perikanan yang dikelola dalam skala besar.

**Sumber air**

*1. Mata air.*

Kebutuhan air di Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar disuplai dari Sumber air yang berasal dari sumber :

* Buhung Bakkara dengan debit kira-kira 5 liter/detik.
* Te’e Longsa dengan debir kira-kita 7 liter/detik
* Balang Bakka’ yang sudah disurvey oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk pembuatan Embung yang rencananya akan dijadikan sumber air di Desa Kalaotoa dan Desa Lembag Matene.
* Buhung Tallu dengan debit kira-kira 3 liter/detik
* Kawawu dengan debit kira-kira 3 liter/detik
* Garaupa dengan debit kira-kira 4 liter/detik
* Garupa Raya dengan debit kira-kira 5 liter/detik

Sumber mata air ini dikelola secara swakelola oleh masyarakat masing-masing di dekat sumber mata air tersebut.

*2. Sumur*

Sumur yang ada di wilayah Kecamatan Pasilambena hampir tersebar di setiap desa dengan kedalaman 2 - 5 m dengan warna air pada umumnya jernih. Khusus untuk Desa Karumpa di Pulau Karumpa, tidak terdapat mata air dan sumurpun tidak bias digunakan optimal karena kandungan airnya yang payau.

3. PemanfaatanLahan.

Lahan di wilayah Kecamatan Pasilambena di dominasi oleh perkebunan kelapa dan jambu mente yang dominan. Juga terdapat coklat, pala dan beberapa tanaman lain namun dalam jumlah yang sangat terbatas.

*1. Perkebunan Kelapa*

Perkebunan kelapa dikelola secara turun temurun oleh masyarakat Kecamatan Pasilambena. Perkebunan kelapa ini merupakan primadona yang menjadi penghasilan utama. Kualitas olahan berupa kopra kualitasnya sangat baik. Hal ini terbukti dari tingginya perbedaan harga dibanding dengan harga kopra dari sentra produksi di tempat lain di daratan pulau Selayar.

*2. Perkebunan Jambu Mente*

Jenis tanaman perkebunan lainnya adalah jambu mente. Komoditi ini belakangan mulai diminati dan seiring dengan bertmbah baiknya harga, maka petani di wilayah Pasilambena giat mengembangan perkebunan jambu mente ini.

4. Batuan dan Tanah

*1. Batuan*

Jenis batuan yang ada adalah batuan sedimen yang berasal dari sedimen kwarter berupa napal, batu kapur, kerikil dan sebagainya. Batuan pasir dan batu kapur dapat digunakan untuk bahan bangunan, misalnya pembuatan jalan, bendungan, jembatan, rumah dan lain-lain.

*2. Tanah*

Jenis tanah di Wilayah Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dikelompokan Mediteran;

Bahan induknya terbentuk oleh batu kapur keras, batuan sedimen dan tuf volkan basa. Topografinya berombak hingga berbukit. Tekstur tanahnya lempung hingga liat. Konsistensi gembur hingga teguh. Struktur gumpal hingga gumpal bersudut. Kepekaan erosi besar Kandungan unsur hara tergantung dari bahan induk umumnya relatif tinggi kadarnya. Permeabilitas sedang. Kepekaan erosi besar hingga sedang.

5. Iklim

Kondisi iklim Kecamatan Pasilambena selama tahun tercatat rata-rata suhu udara berkisar antara 27°C - 35°C. Sedangkan suhu maksimum mencapai 35°C dan suhu minimum 20°C . Rata kelembaban udara berkisar 74% - 82%. dengan kelembaban maksimum 97% dan minimum mencapai 37%. Seperti umumnya daerah lain di Indonesia, Kecamatan Pasilambena mengikuti perubahan putaran 2 iklim, musim hujan pada muson barat, dan musim kemarau pada muson timur. Curah hujan yang relatif tinggi terjadi pada bulan Desember, Januari, Pebruari, Maret, dan April. Sedangkan pada bulan Juni, Agustus, hingga Nopember curah hujan relatif rendah karena dalam musim kemarau.

**STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN**

Perbup. No. 29 Tahun 2009

**C A M A T**

**SEKRETARIS CAMAT**

**KA. SUBAG**

**UMUM, KEPEGAWAIAN & KEUANGAN**

**KA. SUBAG**

**HUKUM, PERENCANAAN, & PELAPORAN**

**SEKSI PEMERINTAHAN**

**SEKSI**

**TRANTIBUM**

**SEKSI**

**EKBANG**

**SEKSI**

**KESOS**

**SEKSI**

**PMD**

**Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kecamatan Pasilambena**

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi, Camat, Sekretaris, Sub Bagian dan Seksi pada Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Selayar Kabupaten yang merupakan hasil penjabaran dari Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

A. Tugas Pokok Kecamatan

Sebagai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan masyarakat, dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan.

B. Fungsi Kecamatan

1. Pelaksanaan perencanaan dan perumusan bahan kebijakan program kerja bidang Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Pembangunan, Pengembangan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial;

2. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan, penganalisisan data dibidang Pemerintahan, ketenteraman dan Ketertiban Umum, pembangunan, pengembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial;

3. Penyelenggaraan kegiatan perumusan, ketenteraman dan Ketertiban Umum, pembangunan, pengembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial;

4. Pelaksanaan Inventarisasi Aset Daerah atau Kekayaan Daerah lainnya yang ada di Wilayah Kecamatan serta pemeliharaan dan pengelolaan fasilitas umum dan fasilitas sosial;

5. Pelaksanaan pertimbangan pengangkatan Kepala Kelurahan;

6. Pelaksanaan peningkatan usaha-usaha pengembangan ekonomi Desa dan Kelurahan;

7. Pelaksanaan ketatausahaan umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan;

8. Pelaksanaan pemberian rekomendasi/perijinan kewenangan di bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pembangunan, Pengembangan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial sesuai dengan kewenangannya;

9. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;

10. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait dengan kegiatan Pemerintahan Kecamatan;

11. Pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi, pengendalian serta pelaporan kegiatan Pemerintahan Kecamatan;

Selain tugas sebagaimana dimaksud diatas, Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek :

**URUSAN WAJIB MELIPUTI :**

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan yaitu :

a. Koordinasi perencanaan pendidikan dan tenaga kependidikan di wilayah kecamatan.

b. Pembinaan dan pengawasan pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan non formal di wilayah kecamatan.

2. Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan yaitu :

a. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan awal, serta pelaporan kejadian luar biasa (wabah penyakit menular /tidak menular) skala kecamatan.

b. Penyelenggaraan pencegahan dan pelaporan pencemaran lingkungan skala kecamatan

c. Penanggulan awal dan pelaporan gizi buruk.

d. Mengkoordinasikan pemberdayaan individu, keluarga dan masyarakat perilaku hidup sehat dan pengembangan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM), desa siaga, posyandu, polindes, UKK.

3. Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum yaitu :

- Pengkoordinasian dan pelaporan kejadian bencana terkait Bidang Pekerjaan Umum di Wilayah Kecamatan.

4. Urusan Pemerintah Bidang Perumahan yaitu :

a. Pengkoordinasian dan pelaporan kejadian bencana bidang perumahan di wilayah kecamatan

b. Pelayanan dan fasilitasi penanganan maasalah dan sengketa bidang perumahan di kecamatan / desa.

5. Urusan Pemerintah Bidang Penataan Ruang yaitu :

a. Pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kecamatan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

b. Pemberian rekomendasi dan pertimbangan pemanfaatan, serta pengawasan ruang di wilayah kecamatan.

6. Urusan Pemerintah Bidang Perencanaan Pembangunan yaitu :

a. Koordinasi perencanaan pembangunan kecamatan/desa berdasarkan pedoman dan standar yang ditetapkan pemerintah kabupaten.

b. Pelaksaanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah skala kecamatan.

7. Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup yaitu :

a. Koordinasi pengendalian dan pengawasan pelestarian lingkungan hidup.

b. Usulan penetapan kawasan yang berisiko bencana.

8. Urusan Pemerintah Bidang Pertanahan yaitu :

a. Pendataan dan pengawasan tanah pemerintah diwilyah kecamatan.

9. Urusan Pemerintah Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil yaitu:

a. Koordinasi pengawasan penyelengara administrasi kependudukan dan pindah penduduk.

b. Penyelenggaraan pendataan, pendaftaran penduduk dan pelaporan skala kecamatan meliputi :

- Pendaftaran/pelaporan berkala perubahan alamat

- Pendaftaran/pelaporan berkala pindah/datang penduduk

- Penataan pendukung penertiban dokumen penduduk.

c. Penyelenggaraan pelayanan pengdukung akta-akta pencatatan sipil dan pelaporan berkala system administrasi kependudukan meliputi :

- Pencatatan kelahiran

- Pencacatan perkawinan

- Pecatatan perceraian

- Pencatatan kematian

d. Pelayannan penertiban surat keterangan ahli waris

e. Pelayanan penertiban surat keterangan kematian

f. Pelayanan penertiban surat keterangan kelahiran

g. Pengesahan akta akta cacatan sipil dan dokumen kependudukan (KK dan KTP)

10. Urusan Pemerintah Bidang Sosial yaitu :

a. Identifikasi sasaran penanggulangan masalah social skala kecamatan.

b. Penangulangan dini dan pelaporan korban bencana skala kecamatan

11. Urusan Pemerintah Bidang Tenagakerjaan yaitu :

- Pendataan dan perencanaan tenaga kerja skala kecamatan.

12. Urusan Pemerintah Bidang Koperasi dan UKM yaitu :

- Pembinaan dan pengembangan koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) skala kecamatan.

13. Urusan Pemerintah Bidang Kebudayaan yaitu :

a. Perluasan informasi sejarah lokal.

14. Urusan Pemerintah Bidang Kepemudaan dan Olah Raga yaitu :

a. Kepemudaan :

- Fasilitas dan dukungan aktifitas kepemudaan

- Koordinasi pembinaan bidang kepemudaan skala kecamatan.

- Pembinaan terhadap organisasi dan kegiatan kepemudaan.

b. Olah Raga.

- Koordinasi pembinaan dan pengembangan keolahragaan skala kecamatan.

15. Urusan Pemerintah Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri yaitu :

a. Pembinaan dan Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, desa dan keseluruhan.

16. Urusan Pemerintah Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, dan Kepegawaian yaitu :

a. Pemerintah Umum terdiri atas :

- Pembinaan wilayah pemerintahan desa

1. Koordinasi dan fasilitasi harmonisasi hubungan antara desa di wilayah kecamatan
2. Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian konplik antara desa di wilayah kecamatan

- Trantibum dan Linmas

1. Koordinasi penegakan perda/peraturan bupati di wilayah kecamatan
2. Pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat skala kecamatan

b. Administrasi Keuangan Daerah terdiri atas :

- Pelaksanaan, pengelolaan dan pelaporan pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan lainnya, yaitu :

1. Retribusi daerah pelayanan pasar kecamatan

2. Retribusi daerah pelayanan persampahan

- Koordinasi pendataan dan pelaporan asset daerah di wilayah kecamatan desa.

17. Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yaitu :

a. Pemerintahan Desa terdiri atas :

- Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan dan pengawasan administrasi pemerintahan desa di wilayahnya

- Pembinaan, pengawasan dan fasilitasi Badan Permusywaratan Daerah (BPD) di wilayahnya

- Evaluasi monitoring fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan APBD desa, laporan pertanggung jawaban APBD Desa di wilayahnya

- Fasilitasi penyusunan laporan keterangan pertanggung jawaban (LPPJ) kepala desa dan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa (LPPD) di wilayahnya

b. Penguatan pengembangan dan pengembangan kehidupan sosial Budaya Masyarakat :

- Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan dan pelaporan data profil desadi wilayahnya

c. Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat

- Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan dan pelaporan data profil desa di wilayahnya

- Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan perempuan skala kecamatan

d. Koordinasi dan Fasilitasi Gerakan PKK Skala Kecamatan

**URUSAN PILIHAN MELIPUTI :**

1. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan yaitu :

- Koordinasi pelaksanaan pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan di tingkat kecamatan.

2. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian yaitu :

a Tanaman pangan dan holtikultura terdiri atas :

- Koordinasi pengawasan dan pelaporan tata ruang dan tata guna lahan pertanian skala kecamatan

- Koordinasi bimbingan dan pengawasan pemanfaatan sumber sumber air dan irigasi

- Koordinasi laporan kejadian penyakit tanaman skala kecamata

b. Perkebunan terdiri atas :

- Koordinasi pengawasan sumber sumber air untuk perkebunan

c. Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri atas :

- Koordinasi pelaporan kasus wabah dan penyakit hewan menular di wilayah kecamatan

3. Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan yaitu :

- Koordinasi pengawasan

4. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan yaitu :

- Pengembangan keterangan untuk mendapatkan izin usaha perdagangan

Data PNS Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai dengan tingkat pend idikan, secara terperinci sebagai berikut :

Tabel 1

Data PNS Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar

Sesuai dengan Tingkat Pendidikan

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | **TINGKAT PENDIDIKAN** | **JUMLAH** | | **PROSENTASE** | |
| **PNS** | **CPNS** | **PNS** | **CPNS** |
| 1 | S2 | 1 | 0 | 10 % | 0 |
| 2 | S1 | 8 | 0 | 30 % | 0 |
| 3 | D3 | 1 | 0 | 12 % | 0 |
| 4 | SLTA | 3 | 0 | 40 % | 0 |
| 5 | STP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SD | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | | **13** | **0** | **100 %** | **0** |

Tabel 2

Data PNS Menurut Golongan Ruang dan Tingkat Pendidikan Formal

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | **Gol. Ruang** | **Tingkat Pendidikan Formal (orang)** | | | | | | | | **JML** |
| **S2** | **S1** | **D3** | **D2** | **D1** | **SLTA** | **SLTP** | **SD** |
| 1 | IV/c | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2 | IV/b | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | IV/a | 1 |  | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 4 | III/d | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 5 | III/c | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 6 | III/b | -- | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 3 |
| 7 | III/a | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | II/d | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | II/c | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
| 10 | II/b | - | - | - | - | - | - |  | - |  |
| 11 | II/a | - | - | - | - | - | 2 |  | - | 2 |
| Jumlah | | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **13** |

**Perlengkapan :**

Sedangkan Keberadaan sarana dan peralatan kerja sangat mendukung penyelengaraan tugas pokok dan fungsi organisasi. Sarana dan Peralatan Kerja Utama di Kecamatan Pasilambena meliputi gedung kantor dan perlengkapannya.

Adapun sarana dan prasarana yang tersedia di Kecamatan Pasilambena disajikan dalam bentuk inventaris barang sesuai Permendagri No 17 TH 2007 antara lain :

Data Asset Kecamatan Pasilambena:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Jenis Barang / Nama Barang | Merk/ Type | tahun pembeli an | Asal usul | Keterangan | |
| **Kondisi** | **Fisik** |
| 1 | Mesin Proses Apung Lain-lain | yanmar | 2014 | Pembelian | RUSAK BERAT | Mesin Kapal 3 Unit.. |
| 2 | Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain | Toyota / Rush S MT F 700 | 2007 | Pembelian |  | Sekretariat Daerah |
| 3 | Sepeda Motor | Yamaha / Vixision | 2013 | Pembelian |  |  |
| 4 | Sepeda Motor | yamaha / Mio | 2013 | Pembelian |  |  |
| 5 | Sepeda Motor | Zusuki / Thunder 125 N | 2007 | Pembelian | RUSAK RINGAN | FISIK ADA |
| 6 | Sepeda Motor | zusuki F1 / SHOGUN 125 | 2007 | Pembelian |  |  |
| 7 | Sepeda Motor | YAMAHA / MIO M3 125 CC | 2015 | Pembelian |  |  |
| 8 | Sepeda Motor | Yamaha / Yamaha New Mio M3 125 | 2016 | Pembelian |  |  |
| 9 | Sepeda Motor | Yamaha / Mio Soul GT AKS SSS | 2018 | Pembelian |  |  |
| 10 | Kendaraaan Bermotor Beroda Tiga Lain-lain | KAISAR KAISAR / KAISAR TRISEDA | 2015 | Pembelian | RUSAK RINGAN | ALAT ANGKUT RODA 3 |
| 11 | Kapal Motor | kapal Kayu / Kapal motor | 2014 | Pembelian | RUSAK BERAT | Kapal motor angkutan Mahkota Pasilambena |
| 12 | Filling Besi/Metal | Brother / - | 2007 | Pembelian |  |  |
| 13 | Lemari Makan | - | 2008 | Pembelian |  |  |
| 14 | Lemari Kayu | - / - | 2004 | Pembelian |  |  |
| 15 | Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap) | - | 2009 | Pembelian | RUSAK BERAT | FISIK ADA |
| 16 | Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap) | GOLD POSTUREMATIC | 2018 | Pembelian |  |  |
| 17 | Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap) | PILLO AMERICAN | 2018 | Pembelian |  |  |
| 18 | Tempat Tidur Kayu (lengkap) | - | 2008 | Pembelian |  |  |
| 19 | Meja Rapat | - | 2009 | Pembelian |  |  |
| 20 | Meja Rapat | - | 2018 | Pembelian |  |  |
| 21 | Meja Rapat | - | 2018 | Pembelian |  |  |
| 22 | Meja Makan | - | 2008 | Pembelian |  |  |
| 23 | Meja Makan | - | 2018 | Pembelian |  | Meja Makan dan Kursi Makan |
| 24 | Kursi Rapat | Futura | 2014 | Pembelian |  | Kursi Rapat (1 Paket.) 30 Buah. |
| 25 | Kursi Rapat | - | 2018 | Pembelian |  |  |
| 26 | Kursi Rapat | - | 2018 | Pembelian |  |  |
| 27 | Kursi Tamu | - | 2008 | Pembelian | RUSAK BERAT | FISIK TIDAK ADA |
| 28 | Kursi Tamu | - | 2018 | Pembelian |  |  |
| 29 | Kursi Biasa | - | 2008 | Pembelian | RUSAK BERAT | FISIK TIDAK ADA |
| 30 | Tenda | Tenda Terowongan | 2017 | Pembelian |  | Tenda Terowongan |
| 40 | Sofa | - | 2018 | Pembelian |  |  |
| 31 | Lemari Pakaian | - | 2008 | Pembelian |  |  |
| 32 | MOUBILER LAINNYA | - / - | 2004 | Pembelian |  |  |
| 33 | Alat Pendingin Lain-lain | Sharp | 2011 | Pembelian |  | Kulkas Serbaguna.. |
| 34 | Alat Pendingin Lain-lain | - | 2011 | Pembelian |  | Kulkas Satu Pintu |
| 54 | Televisi | Panasonik | 2008 | Pembelian |  |  |
| 35 | Sound System | BMB Audio Sistem / CS 450 V | 2014 | Pembelian |  | Sound Syistim untuk aula |
| 36 | Lap Top | Sony | 2013 | Pembelian | RUSAK RINGAN | FISIK ADA |
| 37 | Lap Top | Accer | 2014 | Pembelian |  |  |
| 38 | Lap Top | ACCER / LAKTOP ACCER | 2015 | Pembelian |  |  |
| 39 | Lap Top | LENOVO ULTRABOOK YOGA 13 | 2015 | Pembelian |  |  |
| 40 | Lap Top | ACCER | 2016 | Pembelian |  | LAPTOP |
| 41 | Lap Top | Lenovo V330-6WID | 2018 | Pembelian |  |  |
| 42 | Lap Top | Lenovo IP320 | 2018 | Pembelian |  |  |
| 43 | Lap Top | Ip330 Lenovo / Ip330 Lenovo | 2019 | Pembelian |  | CAMAT PASILAMBENA |
| 44 | Lap Top | Ip320 Lenovo / Ip320 Lenovo | 2019 | Pembelian |  | SEKCAM |
| 72 | Printer | Canon IP 2770 / IP 2770 | 2014 | Pembelian |  | Printer Canon |
| 73 | Printer | CANON MP 280 / MP 280 | 2015 | Pembelian |  | PRINTER |
| 74 | Printer | CANON / MP 280 | 2015 | Pembelian |  | PRINTER |
| 45 | Printer | CANON / IP 2770 | 2015 | Pembelian |  | PRINTER |
| 46 | Printer | Hp Deksjet / - | 2007 | Pembelian | RUSAK BERAT | FISIK ADA |
| 47 | Meja Kerja Pejabat Eselon IV | - | 2009 | Pembelian |  |  |
| 48 | Meja Kerja Pejabat Lain-lain | Futura | 2014 | Pembelian |  |  |
| 49 | Kursi Kerja Pejabat Eselon III | Futura / Sandaran Tinggi | 2014 | Pembelian |  |  |
| 50 | Lemari Arsip untuk arsip Dinamis | Brother / - | 2007 | Pembelian |  |  |
| 51 | Lemari Arsip untuk arsip Dinamis | Brother | 2014 | Pembelian |  | Lemari Arsip 1 Buah |
| 52 | Proyektor + Attachment | Sony / VPL DX102HDMI | 2015 | Pembelian |  | 1. LCD DAN LAYAR SONY  LCD DAN LAYAR (PROYEKTOR) |
| 53 | Microphone/Wireless Mic | - | 2009 | Pembelian | RUSAK BERAT | FISIK ADA |
| 54 | Microphone/Wireless Mic | VISHIBA / PRO VT-U1009NEW | 2015 | Pembelian |  |  |
| 55 | Professional Sound System | Yamaha | 2012 | Pembelian |  | Keyboard Elekton |
| 56 | Camera Electronic | EOS 1500D / GS1-128 | 2019 | Pembelian |  | CAMAT |
| 57 | Amplifier | DA - 2000 Pro / ICKC 0920 | 2014 | Pembelian |  |  |
| 93 | Sound System | - | 2009 | Pembelian |  |  |
| 58 | Handy Talky | Morgen / MGH.8 | 2017 | Pembelian |  |  |
| 59 | Mesin genset | Carlton-650 Roted Power KWH 4,5  Max power KW,50  Voltage Voltage V 220  Power vactor COS 1.0  Frequensi HZ50 | 2022 | Pembelian |  | genset |

1. **Isu-Isu Strategis**

Seiring dengan perkembangan global saat ini, , pandemic global covid-19 yang sepanjang tahun terjadi. Kejadian luar biasa secara global ini membawa dampak yang sangat signifikan bagi masyarakat dunia dan masih dalam proses pemulihan pada akhir 2022. hal ini secara regional dan lokal sangat berpengaruh. Beberapa isu-isu yang dianggap stragetis untuk menjadi focus pembangunan ditahun 2022.

Berikut ini isu-isu strategis yang dipandang perlu oleh Camat Pasilambena :

* 1. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan;

1. Pelayanan publik
   1. Masyarakat tertib hukum dan tertib lingkungan.
   2. Potensi ekonomi
   3. SDM administrasi petugas pelayanan di tingkat desa ;
2. Hubungan antara lembaga dari tingkat kecamatan hingga ketingkat desa ;
3. Koordinasi sinergitas dengan dinas/instansi terkait
4. Toleransi, kekeluargaan dan kerukunan dalam masyarakat
5. Kegiatan kearifan lokal
6. Stabilitas keamananan.

**BAB II**

**PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA**

* 1. **RENCANA STRATEGI**

1. **Visi dan Misi Kecamatan Pasilambena**

Visi Kecamatan Pasilambena adalah ***” Layanan Umum dan Perlindungan Masyarakat Berkualitas Tinggi Menuju Tercapainya Kepuasan Masyarakat Di Kecamatan Pasilambena ”***.

Visi tersebut dimaksudkan sebagai arah untuk mewujudkan Kantor Kecamatan Pasilambena sebagai lembaga yang berkompeten dalam pelayanan prima dan professional kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan peraturan- perundangan yang berlaku sesuai dengan tuntutan global dalam melayani masyarakat dengan transparan, akuntabel dan partisipatif untuk mendukung terwujudnya Kabupaten Kepulauan Yang Maju, Sejahtera dan Religius.

Pencapaian Visi tersebut dilaksanakan dengan beberapa Misi yang harus dicapai dalam rangka mewujudkan Kabupaten Kepulauan Selayar Sebagai Kabupaten Kepulauan Yang Maju, Sejahtera dan Religius, yaitu :

1. Pengurusan dan pengaturan bagian urusan pelayanan umum dan perlindungan masyarakat dalam upaya penataan organisasi kecamatan.
2. Pengurusan dan pengaturan bagian pelayanan dasar masyarakat, peningkatan kesejahteraan, lingkungan hidup dan kependudukan serta lingkungan strategis lainnya.
3. Fasilitasi dan penegakan perda serta kebijakan lainnya, pendidikan politik dan pembinaan kesatuan bangsa.
4. Fasilitasi penyelenggaranya kehidupan beragama dan pemantapan nilai-nilai religius masyarakat.
5. Fasilitasi pengelolaan potensi melalui pemanfaatan sumberdaya dalam kerangka ekonomi masyarakat lokal.

Ketetapan misi Kecamatan Pasilambena tersebut diatas, nantinya diharapkan pergerakan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di wilayah Kecamatan Pasilambena yang berada di wilayahnya dapat bersinergis dalam mencapai tujuan yang diarahkan untuk mewujudkan visi Kabupaten Kepulauan Selayar.

1. **Faktor-faktor Kunci Keberhasilan dan Analisa SWOT**

Menggunakan analisis lingkungan strategis (Analisis SWOT / Strenght, Weakness, Opportunity and Threath). Dengan hasil pada masing-masing analisis sebagai berikut :

**Analisis Lingkungan Internal**

**Faktor Kekuatan (Strong)**

1. Telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor Tahun 2008 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat.
2. Aparat Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi, dimana keterbatas jumlah personil menjadi pemicu semangat untuk meningkatkan kerjasama.
3. Pola kerja di Kecamatan Pasilambena yang sistematik dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif; Paralelisasi pekerjaan yang dioptimalkan.
4. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman;
5. Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang relative cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas – tugas di Kecamatan;
6. Sumber Daya Manusia yang mempunyai etos kerja yang tinggi.

**Faktor Kelemahan (Weakness)**

1. Kurangnya jumlah pegawai di SKPD Kecamatan Pasilambena dan di tingkat desa;
2. Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat belum disertai dengan adanya juklak dan juknis;
3. Belum mendapatkan pelatihan sebagai tenaga operator komputer yang berhubungan dengan pelayanan;
4. Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan lewat musrenbang masih belum tepat waktu/belum sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini karena proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan serta sulitnya menjalin dan mengatur koordinasi antar Instansi dalam urusan perencanaan.
5. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan.
6. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program – program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen – dokumen perencanaan.
7. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan maupun dalam pelaksanaan dan pengawasannya.

**Analisis Lingkungan Eksternal**

**Faktor Peluang (Opportunity)**

1. Sistem dan birokrasi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar sudah mulai tertata dengan baik.
2. Kepemimpinan Camat yang visioner, berkomitmen dan berintegritas sehingga menciptakan pembangunan yang berpatisipatif di Kecamatan Pasilambena.
3. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
4. Hubungan yang harmonis dengan Instasi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (stakeholders);
5. Letak Kecamatan Pasilambena di tenggara yang berbatas laut langsung dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur di selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara di Timur.
6. Ditetapkannya Perda tentang RPJMD Kota Bandung Tahun 2016 – 2021 yang merupakan pedoman bagi perencanaan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Selayar;

**Faktor Ancaman (Threat)**

1. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan. Dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan;
2. Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan parsitipatif;
3. Bervariasinya tingkat pendidikan, social ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di Kecamatan Pasilambena;
4. Masih adanya kebijakan yang kadang–kadang tidak berpihak pada masyarakat.
5. Letak geografis kepulauan yang jauh dari ibukota kabupaten yang sering luput dari perhatian pemerintah dan legislatif.
6. **Tujuan dan Saran**

**Tujuan**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO | **MISI** | **TUJUAN** |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Pengurusan dan pengaturan bagian urusan pelayanan umum dan perlindungan masyarakat dalam upaya penataan organisasi kecamatan | Mewujudkan Pengurusan dan pengaturan bagian urusan pelayanan umum dan perlindungan masyarakat dalam upaya penataan organisasi kecamatan |
| 2. | Pengurusan dan pengaturan bagian pelayanan dasar masyarakat, peningkatan kesejahteraan, lingkungan hidup dan kependudukan serta lingkungan strategis lainnya | Mewujudkan Pengurusan dan pengaturan bagian pelayanan dasar masyarakat, peningkatan kesejahteraan, lingkungan hidup dan kependudukan serta lingkungan strategis lainnya |
| 3. | Fasilitasi dan penegakan perda serta kebijakan lainnya, pendidikan politik dan pembinaan kesatuan bangsa. | Mewujudkan penegakan perda serta kebijakan lainnya, pendidikan politik dan pembinaan kesatuan bangsa |
| 4. | Fasilitasi penyelenggaranya kehidupan beragama dan pemantapan nilai-nilai religius masyarakat | Mewujudkan penyelenggaranya kehidupan beragama dan pemantapan nilai-nilai religius masyarakat |
| 5. | Fasilitasi pengelolaan potensi melalui pemanfaatan sumberdaya dalam kerangka ekonomi masyarakat lokal | Mengoptimalkan Fasilitasi pengelolaan potensi melalui pemanfaatan sumberdaya dalam kerangka ekonomi masyarakat lokal |

**Sasaran**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO | **Tujuan** | **Sasaran** |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Mewujudkan Penyelenggaranya Kehidupan Beragama Dan Pemantapan Nilai-Nilai Religius Masyarakat | * Kesadaran terhadap kehidupan Bergama dan nilai-nilai religius keagamaan masyarakat semakin terwujud dalam kehidupan social kemasyarakatan |
| 2. | Mewujudkan Pengurusan Dan Pengaturan Bagian Urusan Pelayanan Umum Dan Perlindungan Masyarakat Dalam Upaya Penataan Organisasi Kecamatan | * Tuntas penyiapan system manajemen dan tahapan menuju pengelolaan SDM berkualitas * Tuntas penyiapan/pengadaan dan kemanfaatan asset, infrastruktur administrasi dan pelaksanaan fungsi organisasi kecamatan * Laporan keuangan sesuai standar pertanggungjawaban keuangan yang berlaku dalam system pengelolaan keuangan daerah |
| 3. | Mewujudkan Pengurusan Dan Pengaturan Bagian Pelayanan Dasar Masyarakat, Peningkatan Kesejahteraan, Lingkungan Hidup Dan Kependudukan Serta Lingkungan Strategis Lainnya | * Tuntas pengurusan upaya peningkatan pelayanan dasar dan kesejahteraan masrakat * Tuntas penata kelolaan lingkungan yang berorientasi pelestarian dan perlindungan wilayah kecamatan * Tuntas pengurusan dan pengaturan kependudukan dan catatan sipil di kecamatan |
| 4. | Mewujudkan Penegakan Perda Serta Kebijakan Lainnya, Pendidikan Politik Dan Pembinaan Kesatuan Bangsa | * Tuntas penegakan perda dan kebijakan lainnya sebagai uapaya penciptaan kesadaran masyarakat * Peran kecamatan yang selalu meningkatkan dalam memfasilitasi peningkatan pendidikan politik dan pembinaan kestuan bangsa dikecamatan |
| 5. | Mengoptimalkan Fasilitasi Pengelolaan Potensi Melalui Pemanfaatan Sumberdaya Dalam Kerangka Ekonomi Masyarakat Lokal | * Tuntas perencanaan pengelolaan potensi berbasis pemanfaatan sumber daya secara mandiri dan berkelanjutan * Kemandirian industri berskala mikro sebagai ekonomi baru dan penyangga ekonomi daerah |

1. **Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran**

**Misi Pertama : Fasilitasi penyelenggaranya kehidupan beragama dan pemantapan nilai-nilai religius masyarakat**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tujuan | **Sasaran** | **Strategi** | **Arah Kebijakan** |
| Mewujudkan penyelenggaranya kehidupan beragama dan pemantapan nilai-nilai religius masyarakat | Kesadaran terhadap kehidupan Bergama dan nilai-nilai religius keagamaan masyarakat semakin terwujud dalam kehidupan social kemasyarakatan | * Keselarasan kehidupan beragama dan nilai-nilai religi serta penanaman perilaku hidup beragama | * Peningkatan kesadaran terhadap nilai-nilai dan norma-norma agama |

**Misi Kedua : Pengurusan Dan Pengaturan Bagian Urusan Pelayanan Umum Dan Perlindungan Masyarakat Dalam Upaya Penataan Organisasi Kecamatan**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tujuan | **Sasaran** | **Strategi** | | **Arah Kebijakan** |
| Mewujudkan Pengurusan dan pengaturan bagian urusan pelayanan umum dan perlindungan masyarakat dalam upaya penataan organisasi kecamatan | Tuntas penyiapan sistem manajemen dan tahapan menuju pengelolaan SDM berkualitas | | * Peningkatan Sumber Daya Aparatur * Pembinaan dan pengembanagan aparatur * Peningkatan kesejahteraan pegawai | * Peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparatur melalui pendidikan dan latihan secara berjenjang, berkala dan berkelanjutan * Pembangunan system pembinaan dan pengembangan informasi kepegawaian * Peningkatan daya dukung operasional organisasi |
| Tuntas penyiapan/pengadaan dan kemanfaatan asset, infrastruktur administrasi dan pelaksanaan fungsi organisasi kecamatan | * Peningkatan sarana dan prasarana aparatur * Pembinaan dan pengembanagan aparatur | | * Pengembangan sarana dan prasarana * Penguatan administrasi perkantoran |
| Laporan keuangan sesuai standar pertanggungjawaban keuangan yang berlaku dalam system pengelolaan keuangan daerah | * Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja * Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah * Pembinaan dan fasilitasi keuangan desa | | * Penataan keuangan berbasis kinerja efektif dan efesien * Penataan sumber-sumber keuangan daerah * Sinergitas tata kelola keuangan organisasi |

**Misi Ketiga : Pengurusan dan pengaturan bagian pelayanan dasar masyarakat, peningkatan kesejahteraan, lingkungan hidup dan kependudukan serta lingkungan strategis lainnya.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tujuan | **Sasaran** | **Strategi** | **Arah Kebijakan** |
| Mewujudkan Pengurusan dan pengaturan bagian pelayanan dasar masyarakat, peningkatan kesejahteraan, lingkungan hidup dan kependudukan serta lingkungan strategis lainnya | Tuntas pengurusan upaya peningkatan pelayanan dasar dan kesejahteraan masrakat | * Program Keluarga Berencana * Program upaya kesehatan masyarakat * Pembinaan dan pengawasan kebutuhan pendidikan * Peningkatan keberdayaan masyarakat desa * Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa | * Penekanan angka kelahiran menuju keluarga sehat * Perbaikan pola hidup dan kesehatan masyarakat * Pemenuhan kebutuhan pendidikan * Penguatan keberdayaan melalui pengembangan potensi dan nilai-nilai local masyarakat * Penguatan kapasitas perencanaan partisipasif dan pemberdayaan masyarakat |
| Tuntas penata kelolaan lingkungan yang berorientasi pelestarian dan perlindungan wilayah kecamatan | * Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup | * Pelestarian lingkungan secara berkelanjutan |
| Tuntas pengurusan dan pengaturan kependudukan dan catatan sipil di kecamatan | * Penataan administrasi kependudukan | * Pemanaatan system manajemen kependudukan |

**Misi Keempat : Fasilitasi dan penegakan perda serta kebijakan lainnya, pendidikan politik dan pembinaan kesatuan bangsa**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tujuan | **Sasaran** | **Strategi** | **Arah Kebijakan** |
| Mewujudkan penegakan perda serta kebijakan lainnya, pendidikan politik dan pembinaan kesatuan bangsa | Tuntas penegakan perda dan kebijakan lainnya sebagai uapaya penciptaan kesadaran masyarakat | * Peningkatan dan kenyamanan lingkungan | * Sinkroni program dan kegiatan stabilitas wilayah |
| Peran kecamatan yang selalu meningkatkan dalam memfasilitasi peningkatan pendidikan politik dan pembinaan kestuan bangsa dikecamatan | * Pendidikan politik masyarakat * Pengembangan wawasan kebangsaan | * Penguatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam menyikapi dinamika demokrasi politik dan meningkatkan partisipasi politik masyarakat * Pembinaan ketahanan ideology negara |
| Meningkatkan koordinasi keamanan dan ketertiban masyarakat | * Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum | * Peningkatan koordinasi keamanan dan ketertiban masyarakat dengan instansi terkait, serta lembaga lembaga social measyarakat |

**Misi Kelima : Fasilitasi pengelolaan potensi melalui pemanfaatan sumberdaya dalam kerangka ekonomi masyarakat local**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tujuan | **Sasaran** | **Strategi** | **Arah Kebijakan** |
| Mewujudkan penyelenggaranya kehidupan beragama dan pemantapan nilai-nilai religius masyarakat | Mengoptimalkan Fasilitasi pengelolaan potensi melalui pemanfaatan sumberdaya dalam kerangka ekonomi masyarakat lokal | * Pengembangan destinasi parawisata * Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan * Peningkatan produksi pertanian * Pengembangan nilai budaya | * Alokasi wisata dan peningkatan informasi kepariwisataan * Pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan * Pengembangan pertanian * Penggalian budaya local untuk mengdukung pengembangan wisata |

**Indikator Kinerja Utama**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | **Sasaran Strategis** | **Indikator Kinerja Utama** | **Formulasi Pengukuran** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Meningkatnya Pembinaan, Pengawasan, Koordinasi Dan Fasilitasi Layanan Bidang Kesejahteraan Sosial | Jumlah Kegiatan Keagamaan Yang Dilombakan | (Jumlah Desa Yang Diawasi / Jumlah Keseluruhan) X 100% |
| Jumlah Budaya / Nilai Sejarah Yang Dibina Dan Dikembaangkan |
| Jumlah Kegiatan Pemuda Dan Olah Raga Yang Dibina |
| Jumlah Desa Sehat Yang Dibina |
|  |  |  |  |
| 2 | Meningkatnya Pelayanan, Pembinaan Bidang Ekonomi Dan Pembangunnan | Jumlah Pelaku Usaha UMKM Yang Direkomendasikan | (Jumlah Usulan Yang Diakomodir / Jumlah Semua Usulan Dalam Musrembang) X 100% |
| Presentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa |
|  |  |  |  |
| 3 | Meningkatanya Pelayanan Administrasi Pemerintahan | Jumlah Desa Dengan Realisasi PBB Yang Mencapai Target |  |
| Presentase Pelayanan Administrasi Kependudukan | (Jumlah Permohonan Kependudukan Yang Dilayani / Jumlah Permohonan Yang Masuk) X 100% |
| Presentase Pelayanan Adminstrasi Pertanahan | (Jumlah Dokumen Yang Tersedia / Jumlah Permohonan Yang Masuk) X 100% |
| Penataan Administrasi Asset / Kekayaan Daerah | (Jumlah Dokumen Aset Yang Tersedia / Jumlah Dokumen Aset Yang Seharusnya) X 100% |
|  |  |  |  |
| 4 | Meningkatnya Ketentraman Dan Ketertiban Umum | Jumlah Informasi Potensi Bencana Alam Yang Sampaikan Ke Masyarakat |  |
| Jumlah SDLH, Illegal Logging Dan Illegal Fishing Yang Diawasi |  |
| Presentasi Pelaksanaan Dan Penerapan Perda | (Jumlah Perda Yang Dilaksanakan / Jumlah Perda Yang Diserahkan Ke Kecamatan) X 100 % |
| Presentasi Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan | (Jumlah Kasus Yang Ditangai / Jumlah Kasus Yang Dilaporkan) X 100% |
|  |  |  |
| 5 | Meningkatnya Fasilitasi, Penyelenggaraan Layanan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Administrasi APBDes |  |
| Jumlah Desa Siaga |  |
| Jumlah desa yang diikutkan dalam lomba desa |  |
| Presentasi penurunan jumlah penderita gizi buruk | (Jumlah penderita gizi buruk yang ditangani / jumlah penderita gizi buruk yang dilaporkan) x 100% |
| Presentase penurunan jumlah temuan pada laporan keuangan desa | (Jumlah temuan tahun diperiksa / jumlah temuan tahun sebelumnya) x 100% |

1. **Kebijakan**

Defenisi dari kebijakan operasional adalah pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu. Kebijakan operasional merupakan kumpulan keputusan yang menentukan secara teliti tentang bagaimana strategi akan dilaksanakan yang berfungsi mengatur suatu mekanisme tindakan lanjutan untuk pelaksanaan pencapaian tujuan dan sasaran. Penetapan kebijakan merupakan hasil dari penjabaran strategi yang cocok dan dapat dilaksanakan.

Berikut ini langkah-langkah kebijakan yang diambil oleh Camat Pasilambena :

1. Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap proses pelaksanaan pembangunan;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi publik dan mendorong pemerintah di tingkat desa untuk lebih intensif dan progresif meningkatan pelayanan publik kepada masyarakat;
   1. Mendorong peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang tertib hukum dan tertib lingkungan.
   2. Optimalisasi potensi ekonomi sebagai peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui koordinasi yang intensif dengan pemerintah desa.
3. Meningkatkan dan manfaatkan sarana / prasaranasecara;
4. Meningkatkan kemampuan teknis dan administrasi petugas pelayanan dan mendorong peningkatan pelayanan prima di tingkat desa ;
5. Menciptakan hubungan yang harmonis antara lembaga dari tingkat kecamatan hingga ketingkat desa ;
6. Melaksanakan koordinasi dengan dinas/instansi terkait untuk meningkatkan sinergitas program kerja melalui kegiatan koordinasi yang lebih intensif dan periodik;
7. Mengembangkan semangat toleransi, kekeluargaan dan kerukunan melalui kegiatan yang bersifat keagamaan / religi yang periodik;
8. Mendorong kegiatan-kegiatan dengan semangat kearifan lokal yang berbasis pada budaya dan adat serta berbasis pada pelestarian lingkungan.
9. Menciptakan stabilitas keamananan wilayah yang berkesinambungan.
10. **Program**

Program adalah sekumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran. Program yang ditetapkan untuk tahun disesuaikan dengan program kerja dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan adalah sebagai berikut :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | | Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan  Tahun Anggaran 2022 | Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2022 |
| *I* | ***Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/ Kabupaten*** | | 385,180,383 |
|  | 1 | Kkordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semester- SKPD | 8,845,000 |
|  | 2 | Koordinasi Penyusunan DPA- SKPD | 4,335,000 |
|  | 3 | Koordinasi penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 6,668,000 |
|  | 4 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD | 4,820,000 |
|  | 5 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 6,320,000 |
|  | 6 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | 4,765,000 |
|  | 7 | Penyedia Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | 1,662,500 |
|  | 8 | Peneyedia Barang Cetakan dan Penggandaan | 6,000,000 |
|  | 9 | Penyedia bahan logistic Kantor | 21,003,883 |
|  | 10 | Penyedia Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | 2,460,000 |
|  | 11 | Fasilitas Kunjungan Tamu | 21,240,000 |
|  | 12 | Penyelenggara Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 149,215,000 |
|  | 13 | Penyedia jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 21,486,000 |
|  | 14 | Penyedia Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 15,000,000 |
|  | 15 | Penyedia Jasa Pelayanan umum Kantor | 47,,025,600 |
|  | 16 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kantor | 44,420,000 |
| *II* | ***Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum*** | | ***4,640,000*** |
|  | 17 | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 62,300,000 |
| *III* | ***PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM*** | | ***20,000,000*** |
|  | 18 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 20,004,000 |
| *IV* | ***Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa*** | | ***7,379,000*** |
|  | 19 | Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisifatif | 3,439,000 |
|  | 20 | Koordinasi Pembangunan Kawasan Pedesaan di Wilayah Kecamatan | 3,940,000 |
| *V* | ***Program Peningkatan Kinerja Pemerintah Desa*** | | ***24,900,000*** |
|  | 13 | Asistensi Penyusunan APB Desa | 5,866,000 |
|  | 14 | Koordinasi dan Monitoring Kegiatan Pembangunan Desa/Kelurahan | 11,175,000 |
|  | 15 | Musrembang Kecamatan | 7,800,000 |
| *VI* | ***Program Pembangunan Keluarga Berencana / Keluarga Sejahtera*** | | ***25,000,000*** |
|  | 16 | Penunjang Operasional PKK | 25,000,000 |
| *VII* | ***Program Internalisasi Nilai-Nilaai Keagamaan*** | | ***-*** |
|  | 17 | Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Tingkat Kecamatan Pasilambena | - |
| *VIII* | ***Program Pembangunan Kebudayaan dan Cinta Tanah Air*** | | ***35,330,000*** |
|  | 18 | Pelaksanaan HUT Proklamasi | 20,315.000 |
|  | 19 | Pelaksanaan Hari Jadi Selayar | 15,0150,000 |
| *IX* | ***Program Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan*** | | ***-*** |
|  | 20 | Pembinaan Lanjutan Kecamatan Sehat | - |
|  | | | **725,183,698** |

* 1. **INDIKATOR KINERJA UTAMA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Formulasi Pengukuran |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Meningkatnya Pembinaan, Pengawasan, Koordinasi Dan Fasilitasi Layanan Bidang Kesejahteraan Sosial | Jumlah Kegiatan Keagamaan Yang Dilombakan | (Jumlah Desa Yang Diawasi / Jumlah Keseluruhan) X 100% |
| Jumlah Budaya / Nilai Sejarah Yang Dibina Dan Dikembaangkan |
| Jumlah Kegiatan Pemuda Dan Olah Raga Yang Dibina |
| Jumlah Desa Sehat Yang Dibina |
|  |  |  |  |
| 2 | Meningkatnya Pelayanan, Pembinaan Bidang Ekonomi Dan Pembangunnan | Jumlah Pelaku Usaha UMKM Yang Direkomendasikan | (Jumlah Usulan Yang Diakomodir / Jumlah Semua Usulan Dalam Musrembang) X 100% |
| Presentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa |
|  |  |  |  |
| 3 | Meningkatanya Pelayanan Administrasi Pemerintahan | Jumlah Desa Dengan Realisasi PBB Yang Mencapai Target |  |
| Presentase Pelayanan Administrasi Kependudukan | (Jumlah Permohonan Kependudukan Yang Dilayani / Jumlah Permohonan Yang Masuk) X 100% |
| Presentase Pelayanan Adminstrasi Pertanahan | (Jumlah Dokumen Yang Tersedia / Jumlah Permohonan Yang Masuk) X 100% |
| Penataan Administrasi Asset / Kekayaan Daerah | (Jumlah Dokumen Aset Yang Tersedia / Jumlah Dokumen Aset Yang Seharusnya) X 100% |
|  |  |  |  |
| 4 | Meningkatnya Ketentraman Dan Ketertiban Umum | Jumlah Informasi Potensi Bencana Alam Yang Sampaikan Ke Masyarakat |  |
| Jumlah SDLH, Illegal Logging Dan Illegal Fishing Yang Diawasi |  |
| Presentasi Pelaksanaan Dan Penerapan Perda | (Jumlah Perda Yang Dilaksanakan / Jumlah Perda Yang Diserahkan Ke Kecamatan) X 100 % |
| Presentasi Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan | (Jumlah Kasus Yang Ditangai / Jumlah Kasus Yang Dilaporkan) X 100% |
|  |  |  |
| 5 | Meningkatnya Fasilitasi, Penyelenggaraan Layanan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Administrasi APBDes |  |
| Jumlah Desa Siaga |  |
| Jumlah desa yang diikutkan dalam lomba desa |  |
| Presentasi penurunan jumlah penderita gizi buruk | (Jumlah penderita gizi buruk yang ditangani / jumlah penderita gizi buruk yang dilaporkan) x 100% |
| Presentase penurunan jumlah temuan pada laporan keuangan desa | (Jumlah temuan tahun diperiksa / jumlah temuan tahun sebelumnya) x 100% |

* 1. **RENCANA KERJA TAHUNAN**

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan Agenda penyusunan dari kebijakan anggaran yang merupakan komitmen bagi Instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Di dalam Rencana Kinerja ditetapkan rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang Sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya Program, Kegiatan, serta Kelompok Indikator Kinerja dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan indikator Kinerja Kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yeng realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus diorganisasi. Format Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Daftar tabel halaman berikut (berdasarkan tabel tc.27 Renstra 2022– 2026) :

**RENCANA KINERJA TAHUN 2022**

**NAMA SKPD : KANTOR CAMAT PASILAMBENA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Tujuan | Sasaran | Program / Kegiatan | Kegiatan | | | Ket |
| **Indikator Kinerja** | **Satuan** | **Target** |
| 1 | Memperkuat Struktur dan Budaya Organisasi Serta Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.(T-2) | Meningkatkan Kualitas Pemerintahan Daerah yang efektif dan efisien (S-3) | **Administrasi Umum Perangkat daerah** | | | | |
|  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik | bulan | 12 bln |  |
|  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Tersedianya Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan | penyedia | 100% |  |
|  | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah | Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Sebagai Pendudukan Tugas Koordinasi dan Fasilitasi | kali | 40 kali |  |
|  | Pelaksanaan Penunjang Administrasi Perkantoran | Tersedinya Penunjang Administrasi Perkantoran | penyedia | 100% |  |
| 2 | Memperkuat Struktur dan Budaya Organisasi Serta Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.(T-2) | Meningkatkan Kualitas P emerintahan Daerah yang efektif dan efisien (S-3) | **Pemeliharaan Barang Milik Daearah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | |
|  | Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas Operasional | Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional Secara Rutin/Berkala Dengan Baik | paket | 100% |  |
|  | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Tersedianya Peralatan Gedung kantor yang memadai guna menunjang kelancaran tugas | paket | 1 |  |
|  | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor dengan baik | paket | 1 |  |
|  | Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional | Tersedianya Kendaraan dinas yang memadai guna menunjang kelancaran tugas | unit | 0 |  |
|  | Pemeliharan rutin / berkala Perlengkapan Gedung Kantor | Terpeliharanya secara rutin / berkala Perlengkapan Geung Kantor | paket | 1 |  |
| 3 | Memperkuat Struktur dan Budaya Organisasi Serta Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.(T-2) | Meningkatkan Kualitas Pemerintahan Daerah yang efektif dan efisien (S-3) | **Perencana, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | | |
|  | Penyusunan Pelapporan Keuangan Akhir tahun | Tersedianya Laporan Keuangan | dokumen | 1 |  |
|  | Penyusunan LAKIP | Tersedianya LAKIP Kecamatan | dokumen | 3 |  |
|  | Penyusunan Pengelonaan Barang | Tersedianya Laporan Aset | dokumen | 1 |  |
|  | Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan | Tersedianya Berita Acara Rekonsiliasi Keuangan | dokumen | 1 |  |
|  | Penyusunan dan Evaluasi SOP Kecamatan | Tersedianya SOP Kecamatan | dokumen | 1 |  |
|  |  |  | Penyusunan RKA / DPA / DPPA | Tersedianya RKA, DPA, DPA Perubahan | dokumen | 3 |  |
| 4 | Memelihara Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Kesadaran Hukum (T-3) | Terpeliharanya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (S-5) | **Peningkatan koordinasi, fasilitasi dan penyelenggaraan layanan Bidang Ketentraman dan ketertiban umum** | | | | |
|  | Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat (K3) | Terlaksananya Koordinasi Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban dalam penciptaan kehidupan yang kondusif | kegiatan | 1 |  |
| 5 | Meningkatkan Peran Pemuda dan Membudayakan Olah Raga (T-7) | Meningkatnyaa Prestasi Olah Raga Bagi Pemuda dan Masyarakat (S-14) | **Program Pembinaan Kepemudaan dan Olah Raga** | | | | |
|  | Pembinaan Pemuda Dan Olah Raga | Lahirnya pemuda dengan kemandirian dan prestasi yang baik | kegiatan | 1 |  |
|  |  |  |  | | | | |
| 6 | Memelihara Ketertiban Uum dan Ketentraman Masyarakat serta Kesadaran Hukum (T-3) | Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan pemerintahan Desa (S-7) | **Peningkatan Kinerja Pemerintahan Desa** | | | | |
|  | Pembinaan APBD Desa | Terlaksananya Pengelolaan APB Desa Dengan Baik | kegiatan | 1 |  |
|  | Koordinasi dan Pembinaan Pemerintahan Desa / Kelurahan | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Desa | kegiatan | 1 |  |
|  | Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa | Peningkatan kualitas laporan keuangan yang tepat waktu | kegiatan | 1 |  |
|  | Asistensi Penyusunan APB Desa | Tersusunya APB Desa yang sesuai dengan perundang-undangan | laporan | 1 |  |
|  | Musrembang Kecamatan | Tersusunnya Pengusulan Prioritas Pembangunan Di Kecamatan | dokumen | 1 |  |
|  |  |  |  | | | | |
|  | Memperkuat Struktur dan Budaya Organisasi Serta Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.(T-2) | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (S-4) | **Peningkatan Layanan Publik** | | | | |
|  | Pengolahan Dalam Penyusunan Laporan Informasi dan Dokumen Kependudukan | Terperolehnya Data dan Dokumen serta Tersusunnya Laporan Kependudukan Tingkat Kecamatan | laporan | 1 |  |
|  | Koordinasi dan Monitoring Penanggulangan Masalah Sosial | Terlaksananya Koordinasi dan Monitoring Penanggulangan Sosial | laporan | 1 |  |
|  | Memperkuat Struktur dan Budaya Organisasi Serta Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.(T-2) | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (S-4) | **Peningkatan Layanan Publik** | | | | |
|  | Pengolahan Dalam Penyusunan Laporan Informasi dan Dokumen Kependudukan | Terperolehnya Data dan Dokumen serta Tersusunnya Laporan Kependudukan Tingkat Kecamatan | laporan | 1 |  |
|  | Koordinasi dan Monitoring Penanggulangan Masalah Sosial | Terlaksananya Koordinasi dan Monitoring Penanggulangan Sosial | laporan | 1 |  |
|  |  |  |  | | | | |
| 13 | Meningkatnya Derajat Kesejahteraan Masyarakat (T-6) | Berkurangnya Penduduk Miskin (S-8) | **Peningkata Koordinasi dan Fasiitasi Pembangunan Ekonomi Kerakyatan** | | | | |
|  | Koordinasi Fasilitasi dan pembinaan usaha mikro kecil menengah | Terlaksananya pembinaan UKM perdesaan | kegiatan | 1 |  |
|  | Koordinasi Pembangunan sector Pekerjaan Umum | Kebutuhan Pembangunan Fisik yang terprioritaskan | kegiatan | 1 |  |
|  | Koordinasi Pembangunan Sektor Pertanian dan Perkebunan | Presentase peningkatan produksi pertanian dan Perkebunan Jumlah lahan kritis termanfaatkan. | kegiatan | 1 |  |
|  | Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat (S-10) | **Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan** | | | | |
|  | Koordinasi Pembangunan Sektor Pendidikan | Persentase masyarakat yang dapat layanan pendidikan | laporan | 1 |  |
|  | Pembinaan Lanjutan Kecamatan Sehat | Terbinanya Forum Kecamatan Sehat dan Pokja Desa Sehat Swadaya Masyarakat Dengan Baik | dokumen | 1 |  |
|  | Memelihara Fungsi Lingkungan Hidup (T-14) | Terpeliharanya Kelestarian Sumber Daya Alam (S-24) | **Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup** | | | | |
|  |  |  | Pemantauan, Pengawas dan Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | Diperolehnya Informasi dan Kesepakatan Upaya Peningkatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | laporan | 1 |  |
| 8 | Meningkatkan Derajat Kesejahteraan Masyarakat (T-6) | Meningkatnya Kualitas Keluarga, Keberdayaan, dan Peran Perempuan Dalam Pembangunan (S-12) | **Program pembaangunan Keluarga Berencana / Keluarga Sejahtera** | | | | |
|  | Penunjang Operasional PKK Kecamatan | Terlaksananya Kegiatan Pembinaan PKK Di Kecamatan | dokumen | 1 |  |
| 9 | Memperkuat Peran Agama Sebagai Sumber Motivasi dan Inspirasi serta Nilai Utama dalam Penyelenggaraan Pembangunan (T-1) | Meningkatnya Aktifitas Keagamaan dan Kesalehan Sosial Serta Toleransi Antar Umat Beragama.(S-1) | **Internalisasi Nilai-Nilai Keagamaan** | | | | |
|  | Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan | Meningkatnya kualitas murotal dan Lahirnya penghafal Quran | kegiatan | 1 |  |
|  | Penunjang Pelaksanaan Pembinaan Keagamaan | Terjalinnya hubungan toleransi vertikal dan horisonta yang baik | kegiatan | 1 |  |
| 11 | Memamtapkan Jati Diri Keselayaran (T-17) | Meningkatnya Kecintaan dan Kebanggan Sebagai Orang Selayar | **Pembangunan Kebudayaan dan Cinta Tanah Air** | | | | |
|  | Pelaksanaan HUT Proklamasi RI | Terlaksananya HUT Proklamasi | kegiatan | 1 |  |
|  | Pelaksanaan Hari Jadi Selayar | Dipentaskannya Budaya Melalui Pelaksanaan Hari Jadi | kegiatan | 1 |  |

* 1. **PERJANJIAN KINERJA 2022**

Berdasarkan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 , Perjanjian Kinerja antara Camat Pasilambena dengan Bupati Kepulauan Selayar ditetapkan, sebagai berikut :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
| 1 | Meningkatanya Pelayanan Tata Pemerintahan | Terkoordinasikannya penyelenggaraan pemerintahan dalam melakukan pelayanan prima  Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran  Terwujudnya Peningkatan Kinerja Aparatur  Meningkatkan Kualitas Pemerintahan Daerah yang efektif dan efisien | 1. Meningkatnya kehadiran kepala sekolah, guru ASN dan guru tenaga kontrak di tempat tugas masing-masing. 2. Persentase tindak lanjut hasil pengawasan tenaga pengajar. 3. Persentase keaktifan kepala desa dan perangkat desa pada jam kerja. 4. Tersedianya rekapitulasi data pemerintah desa dan potensi desa |
| 2 | Meningkatnya Pelayanan, Pembinaan Bidang Ekonomi Dan Pembangunnan | Berkurangnya Penduduk Miskin  Presentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa  Melakukan pemeliharaan saranan dan prasarana Pelayanan umum bersama pemerintah desa dan masyarakat | 1. Meningkatnya pengawaasan fisik sesuai alokasi anggaran pembangunan desa. 2. Meningkatnya pengawasan dan pembinaan kelancaran program / kegiatan pembangunan desa sesuai alokasi anggaran. 3. Meningkatnya pengawasan dan pemeliharaan saarana dan prasarana umum. |
| 3. | Meningkatnya Pembinaan, Pengawasan, Koordinasi Dan Fasilitasi Layanan Bidang Kesejahteraan Sosial | Meningkatnya Aktifitas Keagamaan dam Kesalehan Sosial Serta Toleransi Antar Umat Beragama  Meningkatnya Prestasi Olah Raga Bagi Pemuda dan Masyarakat  Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat | 1. Persentase peningkatan proses jam belajar mengajar di sekolah. 2. Menurunnya persentase jumlah anak putus sekolah. 3. Terbangunnya kerjasama kegiatan kepemudaan melalui Karang Taruna 4. Tercapainya peningkatan Kecamatan Sehat dan Desa Sehat. |
| 4 | Meningkatnya Fasilitasi, Penyelenggaraan Layanan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa  Meningkatnya peran serta masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat | 1. Presentase peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa. 2. Meningkatnya persentase program / kegiatan pembangunan melalui padat karya. |
| 5 | Meningkatnya Ketentraman Dan Ketertiban Umum | Terpeliharanya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat | 1. Meningkatnya kualitas kantibmas melalui pengawaasan ; miras, judi, kenakalan remaja. 2. Presentase penurunan keterlibatan usia sekolah dalam tidak kriminal |

* 1. **PENETAPAN KINERJA**

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk

(1) meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur,

(2) sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah,

(3) sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi,

(4) menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan

(5) sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi

Kecamatan Pasilambena telah membuat penetapan kinerja tahun secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja. Penetapan Kinerja Kecamatan Pasilambena disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kinerja tahun yang telah ditetapkan secara ringkas, gambaran keterkaitan tujuan, sasaran strategis yang terdapat dalam RPJMD/Rensra, RKT dan Penetapan Kinerja (PK) indikator kinerja dan target Kecamatan Pasilambena tahun sebagai berikut : (table halaman berikut). Tabel ini berdasarkan format tabel tc.27 di RENSTRA 2022 – 2023.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Tujuan | Sasaran | Program / Kegiatan | | Indikator Kinerja | Anggaran |
| 1 | Memperkuat Struktur dan Budaya Organisasi Serta Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.(T-2) | Meningkatkan Kualitas Pemerintahan Daerah yang efektif dan efisien (S-3) | **Administrasi Umum Perangkat daerah** | | | ***393,437,800*** |
|  | 1 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik | 10,000,000 |
|  | 2 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Tersedianya Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan | 3,000,000 |
|  | 3 | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah | Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Sebagai Pendudukan Tugas Koordinasi dan Fasilitasi | 150,000,000 |
|  | 4 | Pelaksanaan Penunjang Administrasi Perkantoran | Tersedinya Penunjang Administrasi Perkantoran | 230,437,800 |
|  | Memperkuat Struktur dan Budaya Organisasi Serta Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.(T-2) | Meningkatkan Kualitas Pemerintahan Daerah yang efektif dan efisien (S-3) | **Pemeliharaan Barang Milik Daearah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | ***105,000,000*** |
|  |  |  | 1 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Tersedianya Peralatan Gedung kantor yang memadai guna menunjang kelancaran tugas | 28,000,000 |
|  |  |  | 2 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor dengan baik | 7,000,000 |
|  |  |  | 3 | Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas Operasional | Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional Secara Rutin/Berkala Dengan Baik | 70,000,000 |
|  | Memperkuat Struktur dan Budaya Organisasi Serta Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.(T-2) | Meningkatkan Kualitas Pemerintahan Daerah yang efektif dan efisien (S-3) | **Perencana, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | | ***2 6,850,000*** |
|  | 1 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | Tersedianya Laporan Keuangan | 4,250,000 |
|  |  |  | 2 | Penyusunan LAKIP | Tersedianya LAKIP Kecamatan | 3,600,000 |
|  |  |  | 3 | Penyusunan Pengelolaan Barang | Tersedianya Dokumen Asett | 6,000,000 |
|  |  |  | 4 | Penyusunan lapporan Keuangan Triwulan | Laporan Rekonsiliasi | 8,500,000 |
|  |  |  | 5 | Penyusunan dan Evaluasi SOP Kecamatan | Tersedianya SOP Kecamatan | 2,250,000 |
|  |  |  | 6 | Penyusunan RKA / DPA / DPPA | Tersedianya dokumen RKA, DPA, DPA Perubahan | 2,250,000 |
|  |  |  | 4 | Penyusunan RKA/DPA/DPPA | Tersedianya Dokumen DPA | 3,000,000 |
| 2 | Memperkuat Struktur dan Budaya Organisasi Serta Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.(T-2) | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (S-4) | **Peningkatan Layanan Publik** | | | ***8,000,000*** |
|  | 1 | Pengolahan Dalam Penyusunan Laporan Informasi dan Dokumen Kependudukan | Terperolehnya Data dan Dokumen serta Tersusunnya Laporan Kependudukan Tingkat Kecamatan | 2,500,000 |
|  | 2 | Pembinaan/Koordinasi Penanggulangan Bencana | Terbinanya Masyarakat Dalam Upaya Penanggulangan Bencana Secara Efektif | 3,000,000 |
|  | 3 | Koordinasi dan Monitoring Penanggulangan Masalah Sosial | Terlaksananya Koordinasi dan Monitoring Penanggulangan Sosial | 2,500,000 |
| 3 | Memelihara Ketertiban Uum dan Ketentraman Masyarakat serta Kesadaran Hukum (T-3) | Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan pemerintahan Desa (S-7) | **Peningkatan Kinerja Pemerintahan Desa** | | | ***20,000,000*** |
|  | 1 | Pembinaan APBD Desa | Terlaksananya Pengelolaan APB Desa Dengan Baik | 2,500,000 |
|  | 2 | Koordinasi dan Pembinaan Pemerintahan Desa / Kelurahan | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Desa | 2,500,000 |
|  | 3 | Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa | Peningkatan kualitas laporan keuangan yang tepat waktu | 2,500,000 |
|  | 4 | Asistensi Penyusunan APB Desa | Tersusunya APB Desa yang sesuai dengan perundang-undangan | 2,500,000 |
|  | 5 | Koordinasi Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa / Kelurahan | SDM dan fasilitas pelayanan di pemerintah desa yang memadai | 2,500,000 |
|  | 6 | Koordinasi dan Monitoring Kegiatan Pembangunan Desa / Kelurahan | Diperolehnya Informasi dan Kesepakatan Upaya Peningkatan Kualitas Program / Kegiatan Pembangunan |  |
|  | 7 | Musrenbang Kecamatan | Terlakasananya Musrenbang Di Tingkat Kecamatan | 10,000,000 |
|  | 8 | Konsultasi, Klarifikasi, Monitoring, dan Evaluasi Penagihan PBB | Presentase peningkatan pendapatan asli daerah |  |
| 4 | Memelihara Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Kesadaran Hukum (T-3) | Terpeliharanya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (S-5) | **Program Peningkatan koordinasi, fasilitasi dan penyelenggaraan layanan Bidang Ketentraman dan ketertiban umum** | | | ***4,800,000*** |
|  | 1 | Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat (K3) | Terlaksananya Koordinasi Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban dalam penciptaan kehidupan yang kondusif | 4,800,000 |
|  | 3 | Sosialisasi Ketertiban Masyarakat | Terselenggaranya Sosialisasi |  |
|  | 4 | Koordinasi dan Fasilitasi Pembinaan Pemantauan Ormas dan LSM | Diperolehnya Informasi dan terpantaunya aktifitas kegiatan di masyarakat |  |
| 5 | Memelihara Fungsi Lingkungan Hidup (T-14) | Terpeliharanya Kelestarian Sumber Daya Alam (S-24) | **Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup** | | | ***2,500,000*** |
|  | 1 | Pemantauan, Pengawas dan Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | Diperolehnya Informasi dan Kesepakatan Upaya Peningkatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | 2,500,000 |
| 6 | Meningkatkan Derajat Kesejahteraan Masyarakat (T-6) | Meningkatnya Kualitas Keluarga, Keberdayaan, dan Peran Perempuan Dalam Pembangunan (S-12) | **Program pembaangunan Keluarga Berencana / Keluarga Sejahtera** | | | ***20,000,000*** |
|  | 1 | Koordinasi Pembangunan dan Penyelenggaraan Layanan KB | Cakupan Peserta KB dan Ratio Akseptor KB baru |  |
|  | 2 | Penunjang Operasional PKK Kecamatan | Terlaksananya Kegiatan Pembinaan PKK Di Kecamatan | 20,000,000 |
| 7 | Memperkuat Peran Agama Sebagai Sumber Motivasi dan Inspirasi serta Nilai Utama dalam Penyelenggaraan Pembangunan (T-1) | Meningkatnya Aktifitas Keagamaan dan Kesalehan Sosial Serta Toleransi Antar Umat Beragama.(S-1) | **Program Internalisasi Nilai-Nilai Keagamaan** | | | ***30,500,000*** |
|  | 1 | Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan | Meningkatnya kualitas murotal dan Lahirnya penghafal Quran | 20,000,000 |
|  | 2 | Penunjang Pelaksanaan Pembinaan Keagamaan | Terjalinnya hubungan toleransi vertikal dan horisonta yang baik | 5,500,000 |
| 8 | Meningkatkan Peran Pemuda dan Membudayakan Olah Raga (T-7) | Meningkatnyaa Prestasi Olah Raga Bagi Pemuda dan Masyarakat (S-14) | **Program Pembinaan Kepemudaan dan Olah Raga** | | | 5,500,000 |
|  | 1 | Pembinaan Pemuda Dan Olah Raga | Lahirnya pemuda dengan kemandirian dan prestasi yang baik | 5,500,000 |
| 9 | Memamtapkan Jati Diri Keselayaran (T-17) | Meningkatnya Kecintaan dan Kebanggan Sebagai Orang Selayar | **Program Pembangunan Kebudayaan dan Cinta Tanah Air** | | | ***100,000,000*** |
|  | 1 | Pelaksanaan HUT Proklamasi RI | Terlaksananya HUT Proklamasi | 75,000,000 |
|  | 2 | Pelaksanaan Hari Jadi Selayar | Dipentaskannya Budaya Melalui Pelaksanaan Hari Jadi | 25,000,000 |
|  | 3 | Koordinasi dan pembinaan Seni Budaya | Jumlah Grup Kesenian dan Jumlah Penyelenggaraan Festival seni Budaya |  |
|  | 4 | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa | Terjalinnya hubungan kemasyarakatan yang kondusif |  |
| 10 | Merevitalisasi Kawasan dan Obyek Wisata (T-10) | Meningkatnya Kunjungan Wisata (S-17) | **Program Pembangunan Kepariwisataan** | | |  |
|  | 1 | Koordinasi Pembangunan Sektor Pariwisata | Peningkatan Partisifasi masyarakat dalam kepariwisataan |  |
| 11 | Meningkatnya Derajat Kesejahteraan Masyarakat (T-6) | Berkurangnya Penduduk Miskin (S-8) | **Program Peningkata Koordinasi dan Fasiitasi Pembangunan Ekonomi Kerakyatan** | | | 9,750,000 |
|  | 1 | Koordinasi Fasilitasi dan pembinaan usaha mikro kecil menengah | Terlaksananya pembinaan UKM perdesaan | 5,250,000 |
|  | 2 | Koordinasi Pembangunan sector Pekerjaan Umum | Kebutuhan Pembangunan Fisik yang terprioritaskan | 2,250,000 |
|  | 3 | Koordinasi pembangunan sector transportasi | Aksesbilitas transportasi yang meningkat |  |
|  | 4 | Koordinasi pembangunan sector ketenagakerjaan | Penurunan angka pengangguran |  |
|  | 5 | Koordinasi pembangunan sector perikanan | Presentase produksi perikanan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi dan luas kawasan konservasi laut yang terjaga. |  |
|  | 6 | Koordinasi Pembangunan Sektor Pertanian dan Perkebunan | Presentase peningkatan produksi pertanian dan Perkebunan Jumlah lahan kritis termanfaatkan. | 2,250,000 |
|  | Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat (S-10) | **Program Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan** | | | 2,250,000 |
|  | 1 | Koordinasi Pembangunan Sektor Pendidikan | Persentase masyarakat yang dapat layanan pendidikan | 2,250,000 |
|  | Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat (S-10) | **Program Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan** | | | ***25,000,000*** |
|  | 1 | Koordinasi Pembangunan Sektor Kesehatan | Persentase masyarakat yang dapat mengakses layanan kesehatan |  |
|  | 2 | Pembinaan Lanjutan Kecamatan Sehat | Terbinanya Forum Kecamatan Sehat dan Pokja Desa Sehat Swadaya Masyarakat Dengan Baik | 25,000,000 |

**BAB III**

**AKUNTABILITAS KINERJA**

1. **PENGUKURAN KINERJA**

Akuntabilitas kinerja merupakann perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor : 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Analisis pencapaian kinerja dilakukan dengan membandingkan kinerja nyata (realisasi) dengan kinerja yang direncanakan. Analisis ini dilakukan atas pencapaian sasaran yang dipengaruhi oleh pelaksanaan kegiatan, dengan membandingkan antara rencana dengan realisasi untuk masing-masing kelompok indikator, yaitu indicator kinerja input, output dan outcome antara yang direncanakan (diharapkan) dengan realisasinya, atau antara rencana kinerja (Performance Plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (Performance Result) yang dicapai. Kemudian dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*Performance Gap*) karena realisasi berbeda dengan yang direncanakan.

Berdasarkan penetapan kinerja Tahun 2022 , serta dengan merujuk pada hasil pelaksanaan program/kegiatan selama tahun bersangkutan, capaian kinerja Kecamatan pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun dapat digambarkan, sebagai berikut :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kode | | | Uraian | | | | | | | | | |
|
| Prog | Keg | Sub Keg |
| 1 |  | 2 | 3 | | | | | | | | | |
| 01 |  |  | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / KABUPATEN** | | | | | | | | | |
|  | 1 |  |  | **Administrasi KeuanganPerangkat Daerah** | | | | | | | | |
|  |  | 1 |  |  | Penyedia Gaji Tunjangan ASN | | | | | | | |
|  |  | 2 |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | **Perencanaan Penganggaran dan Evaluasib Kerja Perangkat Daerah** | | | | | | | | |
|  |  | 3 |  |  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | |  | |  | |
|  |  | 4 |  |  | KoordKoordinasi Penyusunan DPA- SKPD | | | | | | | |
|  |  | 5 |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  | 6 |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capain Kinerja dan IKtiar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | |
|  | 3 |  |  | **Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah** | | | | |  | |  | |
|  |  | 7 |  |  | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD | | | | | | | |
|  | 4 |  |  | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | | | | | | | | |
|  |  | 8 |  |  | Koordinasi dan Pelaksanaan system InformasiKepegawaian | | |  |  | |  | |
|  | 5 |  |  | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | | | | | |  | |
|  |  | 10 |  |  | Penyedia Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan bangunan Kantor | | | | | | | |
|  |  | 11 |  |  | Penyedia Bahan Cetakan dan Penggandaan | |  |  |  | |  | |
|  |  | 12 |  |  | Penyedia Bahan Logistik Kantor | | | | | | | |
|  |  | 13 |  | Penyedia Bahan Bacaan dan Perundang- Undangan | | | | | | | | |
|  |  | 14 |  |  | Fasilitas Kunjungan Tamu | | | | | | | |
|  |  | 15 |  |  | Penyelenggara Rapat- Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | | | | |
|  | 6 |  |  | **Penyedia Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | | | | |  | |
|  |  | 16 |  | Penyedia Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | | | | | | |
|  |  | 17 |  |  | Penyedia jasa Pelayanan Umum Kantor | | | | | |  | |
|  | 7 |  | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan**  **Pemerintahan Daerah** | | | | | | | | | |
|  |  | 18 |  | Pemeliharaan Mesin Lainnya | | | | | | | | |
| 02 |  |  | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | | | | | | | | |
|  |  |  |
|  | 8 |  |  | **Koordinasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat** | | | | |  | |  | |
|  |  | 19 |  |  | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 03 |  |  | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM | | | | | | | | | |
|  | 9 |  |  | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | | | | | | | | |
|  |  | 20 |  |  | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 04 |  |  | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | | | | | | | |
|  | 10 |  |  | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** | | | | | | | | |
|  |  | 21 |  |  | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 05 |  |  | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | | | | | | | | |
|  | 11 |  |  | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |
|  |  | 22 |  |  | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisifatif | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  | 23 |  |  | Koordinasi Pembangunan Kawasan Pedesaan Diwilayah Kecamatan | | | | | | | | |
| 06 |  |  | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | | | | | | | |
|  | 12 |  |  | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** | | | | | | | | | |
|  |  | 24 |  |  | Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Perencanaan Pembangunan Desa | | | | | | | | |
|  |  | 25 |  |  |  | Singkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kecamatan | | | | | | | |

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaia n rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

**85 s/d 100 : Sangat Berhasil**

70 s/d <85 : Berhasil

55 s/d < 70 : Cukup Berhasil

0 s/d< 55 : Tidak Berhasil

Capaian kinerja Kecamatan Pasilambena tahun sesuai dengan table diatas maka presentasi rata-rata capaian adalah ***94,75 %.***

1. **ANALISIS CAPAIAN KERJA**

Pemerintahan Kecamatan Pasilambena merupakan Pembantu Kepala daerah dalam Melaksanakan tugas penyelengaraan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan keluarga berencana, ketenraman dan ketertiban, pelayanan umum, dan pemberian pelayanan administrasi di tingkat kecamatan. Dengan demikian kecamatan Pasilambena sebagai suatu wilayah pemerintahan memiliki hak, wewenang, dan sekaligus kewajiban yangn terbatas untuk mengukur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam rencana strategis Kecamatan Pasilambena tahun 2022 - 2026kebijakan umum pengelolaan keuangan pemerintahan Kecamatan Pasilambena diarahkan pada pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan oleh Bupati.

Evaluasi yang dilakukan terhadap capaian kinerja kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar tahun , diurut berdasarkan sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 – 2026. Berikut diuraikan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja tahun .

1. Program Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Maksud dari Kegiatan perencanaan, penganggaran kinerja perangkat Daerah adalah untuk meujudkan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah dan dokumen pelaporan kinerja perangkat daerah yang berkualitas dan tepat waktu dengan anggaran yang efisien dan sasaran yang efektif :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *1* | Program Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | *15,823,000* | *15,823,000* | *100* |
|  | 1 | Koordinasi Penyusunan DPA- SKPD | 4,335,000 | 4,335,000 | 100 |
|  | 2 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 6,668,000 | 6,668,000 | 100 |
|  | 3 | Koordinasi dan PenyusunanLaporan dan Capaian Kinerja dan ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD | 4,820,000 | 4,820,000 | 100 |
|  | 4 |  |  |  |  |

Capaian kinerja 100% Adapun sasaran Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah untuk meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dan termonitoringnya pelaksanaan kegiatan sehingga tercapai indikatorkinerja dapat dipastikan tercapainya. Adapun kelompok sasaran seluruh ASN Kecamatan Pasilambena pada khususnya.

2. Program Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah

Program Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah adalah ,salah asatu program untuk menunjang tertib administrasi dalam penggunaan Barang Milik Daerah untuk penunjang kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *2* | *PAdministrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah* | | *6,320,000* | *6,195,000* | *99,80* |
|  | 5 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | *6,320,000* | *6,195,000* | 99,80 |

1. Optimalisasi penggunaan anggaran pada program ini dimaksudkan untuk membantu Tertib administrasi tentang pengelolaan dan penggunaan inventaris Barang Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Program Kegiatan Program Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah agar terujud kapasitas sumber daya aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Kecamatan pada Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *3* | *Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah* | | *4,765,000* | *4,765,000* | *100* |
|  | 6 | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu | *4,765,000* | *4,765,000* | 100 |

Terujud kapasitas sumber daya aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Kecamatan

1. Program Administrasi Umum perangkat Daearah

merupakan program rutin untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan dan pelayanan kepada masyarakat, beberapa kegiatan yang masuk dalam program pelayanan administrasi perkantoran ini adalah

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *4* | *Program Administrasi Umum Perangkat Daerah* | | *215,803,333* | *215,371,700* | *99,80* |
|  | 7 | Penyedia Komponen Instalasi Listrik Penerangan Banguna Kantor | 1,662,500 | 1,662,500 | 100 |
|  | 8 | Penyedia Barang Cetakan dan Penggandaan | 6,000,000 | 5,791,200 | 96,52 |
|  | 9 | Penyedia bahan Logistik Kantor | 21,003,833 | 21,003,8330 | 100 |
|  | 10 | Penyedia bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | 2,460,000 | 2,460,000 | 100 |
|  | 11 | Fasilitas Kunjungan Tamu | 21,240,000 | 21,40,000 | 100 |
|  | 12 | Penyelenggara Rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 2,880,000 | 1,800,000 | 62.50 |

Kegiatan ini tidak mendapat kendala karena hanya berupa kegiatan belanja modal pakaian khusus saja.

1. Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *6* | *Program Pemeliharaan Barang Milik daerah* | | 44,420,000 | 40,938,000 | *92,16* |
|  |  | |  |  |  |
|  | 16 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 44,420,000 | 40,938,000 | 92,16 |

Kegaitan ini merupakan kegiatan Yang Bersifat Pemeliharaan Peralatan dan Mesin kantor.

1. Program Pembangunan Keluarga Berencana / Keluarga Sejahtera

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *6* | *Program Pembangunan Keluarga Berencana / Keluarga Sejahtera* | | *25,000,000* | *25,000,000* | *100* |
|  |  | |  |  |  |
|  | 16 | Penunjang Operasional PKK | 25,000,000 | 25,000,000 | 100 |

1. Program Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *7* | *Program Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum* | | *4,640,000* | *560,000* | *12,07* |
|  | 17 | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | *4,640,000* | *560,000* | 12,07 |

1. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *8* | *Penyelenggara Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah* | | 20,000,000 | 20,000,000 | *100* |
|  | 18 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengalaman Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhineka Tunggal Ika SertaPemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. | 20,000,000 | 20,000,000 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |

1. Program Fasilitasi, Rekomendasi,dan Koordinasi dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Sebagai obyek pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, pemerintah desa harus memberi serangkaian informasi yang diperlukan dan melakukan upaya yang direkomendasikan dalam rangka perbaikan dan peningkatan kinerja.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | *Program Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa* | | 7,379,000 | 7,379,000 | 100 |
|  | 19 | Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan partisifatif | 3,349,000 | 3,349,000 | 100 |
|  | 20 | Koordinasi Pembangunan Kawasan Pedesaan di wilayah Kecamatan | 3,940,000 | 3,940,000 | 100 |

1. Program Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Program Pemberdayaan masyarkat merupakan salah satu program pemerintah desa dalam memanfaatkan semua sumber daya yang ada agar dapat berkembang serta dapat membantu proses kemajuan desa. Sasaran dalam program pemberdayaan masyarakat ini mencakup semua bidang, mulai dari pemerintahan, kelembagaan, kesehatan, ekonomi masyarakat, teknologi, dan pendidikan.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | *Program Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa* | | 130,567,567 | 120,539,00 | 92,32 |
|  | 19 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Perencanaan Pembanguna Desa | 6,567,000 | 6,567,000 | 100 |
|  | 20 | Singkronisasi Program Keraja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | 124,000,000 | 113,972,000 | 90,30 |

Kegaitan ini merupakan kegiatan yang mellibatkan partisifasi masyarakat khusus pada ibu-ibu dan gadis remaja berupa kegiatan-kegiatan rumah tangga yang pada kesimpulannya ditujukan untuk membantu kesejahteraan keluarga, baik dalam segi ekonomi, pendidikan, hingga masalah kesehatan dalam keluarga.

7. Program Internalisasi Nilai-Nilai Keagamaam.

Pada program ini tidak dianggarkan karene beberapa alasan yang realistis, terjadinya pandemi covid-19 yang melanda dunia dan antisipasi kegiatan harian yang difokuskan untuk melakukan pencegahan. Protokol kesehatan yang digalakkan untu mencegah penyebaran yang agresif covid-19 tersebut mengakibatkan kegiatan yang melibatkan orang banyak menjadi dilarang atau minimal sangat dibatasi jumlahnya.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *7* | *Program Internalisasi Nilai-Nilai Keagamaam* | | *0* | *0* | *0* |
|  | 17 | Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) | 0 | 0 | 0 |

8. Program Pembangunan Budaya dan Cinta Tanah Air

Program ini yang dimaksudkan untuk melibatkan partisifasi masyarakat secara luas. Program ini ditujukan untuk membangun karakter bangsa. Bangga sebagai Bangsa Indonesia. Bangga sebgai Orang Selayar.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *8* | *Program Pembangunan Budaya dan Cinta Tanah Air* | | *35,330,000* | *15,189,000* | *42.99* |
|  | 18 | Pelaksanaan HUT Proklamasi | 20,315,000 | 14,784,000 | 72.77 |
|  | 19 | Pelaksanaan Hari Jadi Selayar | 15,015,000 | 405,000 | 2.70 |

Namun karena terjadinya pandemic covid-19 yang melanda dunia, dimana pemerintah agresif memberikan himbauan untuk melakukan 3M; memakai masker, menjada jarak, dan mencuci tangan dengan baik. Hal ini pun berimbas pada pelaksanaan upacara dan serimonial pada 2 kegiatan dalam program ini. Upacara peringatan HUT Proklamasi dilakukan dengan sangat sederhana namun hal ini tidak mengurangi hikmatnya upacara. Pun kegiatan serimonial Hari jadi Selayar tidak dilaksanakan sebagaimana biasa dilakukan serimonila dan parade budaya.

9. Program Peningkatan Kuaitas Layanan Kesehatan

Pembinaan Lanjutan Kecamatan Sehat adalah kegaitan yang bersinergi dengan kegiatan PKK. Arah dari kegiatan tersebut adalah untuk lebih memberikan peran aktif dan berkesinambungan para ibu-ibu dan remaja putri di dalam masyarakat. Diharapkan tidak hanya menjadi obyek dari pembangunan namun juga diharapkan lebih giat dan menjadi subyeknya.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | *Program Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan* | | 0 | 0 | 0 |
|  | 20 | Pembinaan Lanjutan Kecamatan Sehat | 0 | 0 | 0 |

Demikian halnya dengan kegiatan ini pun tidak dilaksanakan karena pada pelaksanaan kegiatannya melibatkan masyarakat luas yang oleh pemerintah dihimbau untuk menjaga jarak. Himbauan 3M, maka dengan demikian program ini tidak dilaksakan secara formal, namun pelaksanaannya dalam menjelma dalam bentuk himbuan yang baik formal maupun nonformal dilakukan untuk membantu pemerintah mengatasi penyebaran covid-19 yaitu dengan melaksanakan 3M.

Analisa Secara Umumperihal Pelaksanaan Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2022

Di setiap program/kegaitan yang dilaksanakan tidak terlepas dari kendala atau bahkan masalah yang dihadapi dalam proses pelaksanaan kegiatan tersebut, antara lain yang menjadi konsen adalah:

* 1. *Sosial dan Ekonomi*

Tingkat sosial dan ekonomi dalam masyarakat yang timpang membuat konsentrasi peningkatan kualitas kesehatan masyarakat pada skala domestik menjadi begitu penting. Pemenuhan ekonomi yang pada akhirnya menjadi “penentu” strata sosial dalam lingkungannya. Hal ini terbukti pada beberapa masyarakat dengan ekonomi yang baik, kualitas kesehatannya pun berbanding lurus yaitu berkualitas baik.

Pada skala nasional bahkan secara global, terjadinya penyebaran covid-19 yang menjadi pandemic dunia menjadi kendala terbesar yang dihadapi dalam merealiasisakan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2022.

* 1. *Tingkat Pendidikan*

Tingkat pendidikan pada umumnya di masyarakat di Kecamatan Pasilambena masih sangat kurang. Jika dirata-ratakan, maka tingkat pendidikan pada umumnya hanya sampai SD atau maksimal SMP bagi golongan umur 30 tahunan keatas.

* 1. *Ketertinggalan Wilayah*

Akses untuk ke dan dari wilayah luar kecamatan pada umumnya di Kecamatan Pasilambena masih dalam kategori tertinggal. Walaupun belakangan ini, akses tersebut sudah dibuka dengan adanya jalur pelayaran domestik yang menghubungkan dengan daerah lain, yakni jalur perry dan Sabuk Nusantara. Namun kendala cuaca masih menjadi persoalan besar dan sangat mempengaruhi keterakesesan wilayah. Hal ini berakibat pada kondisi ekonomi, sosial, dan pendidikan masyarakat pada umumnya.

Kendala atau masalah yang dihadapi seperti yang dipaparkan menjadi literature dalam penyusunan strategi pengambilan kebijakan dan arahan pelaksanaan kegiatan di tahun anggaran berikutnya.

1. **REALISASI KEUANGAN**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | URUSAN PEMERINTA HAN | ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA | KEBIJAKAN | URAIAN PROGRAM / KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN | | | TARGET | REALISASI | PERMASALAHAN | UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN PERMSALAHAN | TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD |
|  | Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang | Kecamattan Pasilambena |  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / KABUPATEN | | | Rp 1,377,335,000 | Rp 1,345,815,067 | Sebagian besar kegiatan berjalan sesuai rencana | Koordinasi dan komunikasi intens |  |
|  |  |  |  |  |  | 97.15% |  |
|  |  |  | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | | Rp 852,009,000 | Rp 843,164,000 | Capaian target terlaksana dengan baik |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 90,5% |  |  |
|  |  |  |  |  | Penyedia Gaji dan tunjangan ASN | Rp 843,164,000 | Rp 835,026,903 | Jumlah ASN Berkurang |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 91,35% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Target: 10 dok | Capaian : 10 dok |  |
|  |  |  |  |  |  | Koordinasi dan PenyusunanLaporan Keuangan Bulan/ Truwulan/ Semester- SKPD | Rp 8,845,000 | Rp 8,800,000 | Capaian Target Terlaksana Dengan Baik |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 99,49% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Target : 3 dok | Capaian: 3 dok |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | | Rp  15,823,000 | Rp  15,823,903 | Capaian target terlaksana dengan baik |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 90,5% |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Koordinasi Penyusunan DPA- SKPD | Rp  4,335,000 | Rp  4,335,000 | Capaian Target Terlaksana deangan Baik |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Rp 6,668,000 | Rp 6,668,000 | Capaian Target Terlaksana deangan Baik |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Target : 1 dok | Capaian : 1 dok |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD | Rp 4,820,000 | Rp 4,820,000 | Capaian Target Terlaksana deangan Baik |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Target : | Capaian : |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah** | | Rp  6,320,000 | Rp  6,320,000 | Capaian target terlaksana dengan baik |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 98.89% |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Rp 6,320,000 | Rp 6,195,000 | Dokumen aset masih terkendala pengguna aset belum lengkap | Pendataan aset terus dibenahi / disiplin pengguna aset |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | | Rp  4,765,000 | Rp  4,765,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Rp  4,765,000 | Rp  4,765,000 | Capaian target terlaksana dengan baik |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Administrasi Umum Perangkat Dearah** | | Rp 215,803,333 | Rp 215,371,700 | Capaian target terlaksana dengan baik |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 99,80% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Penyediaan Penyedia Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | Rp 1,662,500 | Rp 1,662,500 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Penyedia Barang Cetakan dan Penggandaan | Rp  6,000,000 | Rp  5,791,200 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 96,52% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Penyedia Bahan Logistik Kantor | Rp 21,003,833 | Rp  21,003,833 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 99.47% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Penyedia Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan | Rp  2,460,000 | Rp  2,460,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Fasilitas Kunjungan Tamu | Rp 21,240,000 | Rp 21,178,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 99,71% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Penyelenggara Rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Rp 149,215,000 | Rp 149,005,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Penyedia jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | Rp 83,511,600 | Rp 77,796,464 | Capaian target terlaksana dengan baik |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 93.16% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Target : | Capaian : |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Penyedia Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik | Rp 21,486,000 | Rp  15,919,664 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 74,09% |  |
|  |  |  |  | Penyedia Jasa Peralatan dan  Perlengkapan Kantor | | | Rp 15,000,000 | Rp 15,000,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 98.69% |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Penyedia Jasa Pelayanan  Umum Kantor | | Rp  47,025,600 | Rp  46,876,800 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 99,68% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 97.25% |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | | Rp.  44,420,000 | Rp.  40,938,000 | Dokumen aset masih terkendala pengguna aset belum lengkap | Pendataan Aset terus Dibenahi/ disiplin Penggunaan Aset |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 92,16% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Rp.  44,420,000 | Rp.  40,938,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 92,16% |  |  |  |
|  |  |  |  | PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | Rp  4,640,000 | Rp  560,000 | Kegiatan berjalan sesuai rencana |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12,07% |  |  |
|  |  |  |  |  | **Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** | | Rp  4,640,000 | Rp  560,000 | Capaian target terlaksana dengan baik |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12,07% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Rp  4,640,000 | Rp  560,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12,07% |  |  |  |
|  |  |  |  | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | Rp 20,004,000 | Rp 20,000,000 | Kegiatan berjalan sesuai rencana |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 99,98% |  |  |
|  |  |  |  |  | **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** | | Rp 20,004,000 | Rp 20,000,000 | Capaian target terlaksana dengan baik |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 99,98% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Rp 20,004,000 | Rp 20,000,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 99,98% |  |  |  |
|  |  |  |  | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | | Rp 7,379,000 | Rp 7,739,000 | Kegiatan berjalan sesuai rencana |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |
|  |  |  |  |  | **Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa** | | Rp 7,379,000 | Rp 7,379,000 | Capaian target terlaksana dengan baik |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisifatif | Rp 3,439,000 | Rp 3,439,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Koordinasi Pembangunan Kawasan Pedesaan di wilayah Kecamatan | Rp.  3,940,000 | Rp.  3,940,00, |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |
|  |  |  |  | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | Rp.  130,567,000 | Rp.  120,539,000 | Kegiatan berjalan sesuai rencana |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 92,32% |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan**  **Desa** | | Rp. 130,567,567 | Rp. 120,539,000 | Capaian target terlaksana dengan baik |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 92,32% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Perencanaan Pembangunan Desa | Rp. 6,567,000 | Rp. 6,567,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Singkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah  Kerja Kecamatan | Rp.  124,000,000 | Rp. 113,972,000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tc. 27 RENSTRA 2022 – 2026 (realisasi)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Tujuan** | **Sasaran** | **Nomenklatur Urusan (Program / Kegiatan / Sub Kegiatan)** | | | **Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)** | | **Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan** | Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | | | **Unit Kerja OPD Penang gung Jawab** | **Lokasi** |
| **Tahun 1** | | **Tahun 2** | | **Tahun 3** | | **Tahun 4** | | **Tahun 5** | | **Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra** | | | |
| **2022** | | **2023** | | **2024** | | **2025** | | **2026** | |
| **Tar-get** | **Rp. (000.000)** | **Tar--get** | **Rp. (000.000)** | **Tar-get** | **Rp. (000.000)** | **Tar-get** | **Rp. (000.000)** | **Tar-get** | **Rp. (000.000)** | **Tar-get** | | **Rp. (000.000)** | |
| 1 | 2 | 3 | 6 | | | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | | 21 | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | Peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan masyarakat (T-1) | Meningkatnya kualitas tatalaksana dan kapasitas organisasi pemerintahan (S-2) | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | Tersedianya dokumen kinerja | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Tersusunnya dokumen perecanaan | |  | 4 dok | 11.623 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | Kab. Kep. Slyr |
|  |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Tersusunnya dokumen RKA | |  |  |  | 1 dok | 2.75 | 1 dok | 2.75 | 1 dok | 2.75 | 1 dok | 2.75 | 1 dok | | 2.75 | |  | Kab. Kep. Slyr |
|  |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Tersusunnya dokumen Perubahan RKA | |  |  |  | 1 dok | 2.75 | 1 dok | 2.75 | 1 dok | 2.75 | 1 dok | 2.75 | 1 dok | | 2.75 | |  | Kab. Kep. Slyr |
|  |  |  | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Tersusunnya dokumen DPA | |  |  |  | 1 dok | 6.875 | 1 dok | 6.875 | 1 dok | 6.875 | 1 dok | 6.875 | 1 dok | | 6.875 | |  | Kab. Kep. Slyr |
|  |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Tersusunnya dokumen Perubahan DPA | |  |  |  | 1 dok | 6.875 | 1 dok | 6.875 | 1 dok | 6.875 | 1 dok | 6.875 | 1 dok | | 6.875 | |  | Kab. Kep. Slyr |
|  |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tersusunnya dokumen LAKIP, LPPD, LKPJ | |  | 3 dok | 4.52 | 3 dok | 7.25 | 3 dok | 7.25 | 3 dok | 7.25 | 3 dok | 7.25 | 3 dok | | 7.25 | |  | Kab. Kep. Slyr |
|  |  |  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tersedianya gaji dan Tunjangan ASN | |  | 100% | 1052 | 100% | 1150 | 100% | 1250 | 100% | 1300 | 100% | 1350 | 1 | | 1350 | |  | Kec. Pslb |
|  |  |  | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Tersusunnya laporan realisasi anggaran | |  | 1 dok | 7.22 | 1 dok | 6.625 | 1 dok | 6.625 | 1 dok | 6.625 | 1 dok | 6.625 | 1 dok | | 6.625 | |  | Kab. Kep. Slyr |
|  |  |  | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Tersusunnya laporan realisasi fisik keuangan | |  | 2 dok | 8.84 | 2 dok | 13.25 | 2 dok | 13.25 | 2 dok | 13.25 | 2 dok | 13.25 | 2 dok | | 13.25 | |  | Kab. Kep. Slyr |
|  |  |  | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Tersusunnya laporan aset BMD | |  | 1 dok |  | 1 dok | 13.25 | 1 dok | 13.25 | 1 dok | 13.25 | 1 dok | 13.25 | 1 dok | | 13.25 | |  | Kab. Kep. Slyr |
|  |  |  | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Tersedianya pakaian dinas lengkap | |  | 100% |  | 100% | 7.5 | 100% | 7.5 | 100% | 7.5 | 100% | 7.5 | 100% | | 7.5 | |  | Kec. Pslb |
|  |  |  | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian | Tersusunnya informasi kepegawaian | |  | 100% |  | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | | 5 | |  | Kab. Kep. Slyr |
|  |  |  | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | Pemulangan Pegawai yang Pensiun |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | Pemindahan Tugas ASN |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Meningkatnya SDM pegawai | |  | 100% | 30.261 | 100% | 25 | 100% | 25 | 100% | 25 | 100% | 25 | 100% | | 25 | |  | Prov. Sul Sel |
|  |  |  | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  | Administrasi Umum Perangkat Daerah | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya penerangan kantor | |  | 100% | 1.716 | 100% | 2 | 100% | 2 | 100% | 2 | 100% | 2 | 100% | | 2 | |  | Kec. Pslb |
|  |  |  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor | |  | 100% | 27.7855 | 100% | 15 | 100% | 15 | 100% | 15 | 100% | 15 | 100% | | 15 | |  | Kec. Pslb |
|  |  |  | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya bahan logistik kantor | |  | 100% | 26.8175 | 100% | 22 | 100% | 22 | 100% | 22 | 100% | 22 | 100% | | 22 | |  | Kec. Pslb |
|  |  |  | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan | |  | 100% | 5.7303 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | 5 | 100% | | 5 | |  | Kec. Pslb |
|  |  |  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | |  | 100% | 3.4877 | 100% | 3.6 | 100% | 3.6 | 100% | 3.6 | 100% | 3.6 | 100% | | 3.6 | |  | Kec. Pslb |
|  |  |  | Penyediaan Bahan/Material |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Terfasilitasinya kunjungan tamu | |  | 100% | 25.5 | 100% | 20 | 100% | 20 | 100% | 20 | 100% | 20 | 100% | | 20 | |  | Kec. Pslb |
|  |  |  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi | |  | 100% | 153.01 | 100% | 169.5 | 100% | 174 | 100% | 174 | 100% | 182.75 | 100% | | 182.75 | |  | Prov. Sul Sel |
|  |  |  | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | Pengadaan Mebel | Tersedinya kelengkapan kantor | |  | 100% |  | 100% | 12 |  |  |  |  | 100% | 12 | 100% | | 12 | |  | Kec. Pslb |
|  |  |  | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | Pengadaan Aset Tetap Lainnya |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor | |  | 100% |  | 100% | 100 |  |  |  |  |  |  | 0 | | 0 | |  | Kec. Pslb |
|  |  |  | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor | |  | 100% |  | 100% | 15 | 100% | 15 | 100% | 15 | 100% | 15 | 100% | | 15 | |  | Kec. Pslb |
|  |  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Tersedianya komudikasi, air dan listrik | |  | 100% | 24.6208 | 100% | 25 | 100% | 25 | 100% | 25 | 100% | 25 | 100% | | 25 | |  | Kec. Pslb |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Tersedinya peralatan dan kelengkapan kantor | |  | 100% | 13.5 | 100% | 15 | 100% | 15 | 100% | 15 | 100% | 15 | 100% | | 15 | |  | Kec. Pslb |
|  |  |  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Tersedinya jasa penlayanan umum kantor | |  | 100% | 165.8352 | 100% | 175 | 100% | 175 | 100% | 175 | 100% | 175 | 100% | | 175 | |  | Kec. Pslb |
|  |  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | Pemeliharaan Mebel |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Terpeliharanya peralatan dan mesin | |  | 100% | 43.14 | 100% | 17 | 100% | 18 | 100% | 19 | 100% | 20 | 100% | | 20 | |  | Kec. Pslb |
|  |  |  | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | Terpeliharanya aset tetap | |  |  |  | 100% | 15 | 100% | 15 | 100% | 15 | 100% | 15 | 100% | | 15 | |  | Kec. Pslb |
|  |  |  | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Perbaikan gedung kantor | |  |  |  | 100% | 200 |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | Kec. Pslb |
|  |  |  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  | Peningkatan Pelayanan BLUD | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | UNSUR KEWILAYAHAN | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | KECAMATAN | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | Peningkatan kapasitas dan fasilitas perdesaan (T-3) | Meningkatnya pemenuhan prasarana dasar perdesaan (S-6) |  |  | Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan | Terfasilitasinya percepatan pencapaian standar pelayanan minimal | |  |  |  | 6 desa | 9 | 6 desa | 9 | 6 desa | 9 | 6 desa | 9 | 6 desa | | 9 | |  | Kec. Pslb |
|  |  |  |  |  | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana danFasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | Peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan masyarakat (T-1) | Meningkatnya kinerja SKPD (S-1) |  |  | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan | |  |  |  | 1 dok | 10 | 1 dok | 10 | 1 dok | 10 | 1 dok | 10 | 1 dok | | 10 | |  | Kab. Kep. Slyr |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | Peningkatan kapasitas dan fasilitas perdesaan (T-3) | Meningkatnya pengelolaan sumberdaya lokal (S-5) |  |  | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Meningkatnya partisipasi masyarakat | |  |  |  | 1 dok | 10 | 1 dok | 10 | 1 dok | 10 | 1 dok | 10 | 1 dok | | 10 | |  | Kec. Pslb |
|  |  |  | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Tersinkronisnya kegiatan pemberdayaan masyarakat | |  | 2 dok | 20 | 2 dok | 20 | 2 dok | 20 | 2 dok | 20 | 2 dok | 20 | 2 dok | | 20 | |  | Kec. Pslb |
|  |  |  | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Meningkatnya efektifitas pemberdayaan masyarakat | |  | 2dok | 16.476 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | Kec. Pslb |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | Peningkatan kualitas pembinaan budaya dan agama (T-9) | Meningkatnya kualitas pembinaan kemasyarakatan (S-12) |  |  | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Terciptanya sinergi yang baik | |  |  |  | 1 dok | 6 | 1 dok | 6 | 1 dok | 6 | 1 dok | 6 | 1 dok | | 6 | |  | Kec. Pslb |
|  |  |  | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Terciptanya hubungan harmonis dalam masyarakat | |  |  |  | 1 dok | 6 | 1 dok | 6 | 1 dok | 6 | 1 dok | 6 | 1 dok | | 6 | |  | Kec. Pslb |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | Peningkatan kualitas pembinaan budaya dan agama (T-9) | Meningkatnya kualitas pembinaan kemasyarakatan (S-12) |  |  | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Meningkatnya kecintaan terhadap tanah air | |  | 2 kegiatan | 40.045 | 2 kegiatan | 40 | 2 kegiatan | 40 | 2 kegiatan | 40 | 2 kegiatan | 40 | 2 kegiatan | | 40 | |  | Kec. Pslb |
|  |  |  |  |  | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | Peningkatan kualitas pembinaan budaya dan agama (T-9) | Meningkatnya kerukunan antar suku dan antar agama (S-11) |  |  | Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional | Terciptanya kerukunan dalam masyarakat | |  |  |  | 1 kegiatan | 15 | 1 kegiatan | 15 | 1 kegiatan | 15 | 1 kegiatan | 15 | 1 kegiatan | | 15 | |  | Kec. Pslb |
|  |  |  |  |  | Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | Peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan masyarakat (T-1) | Meningkatnya kinerja SKPD (S-1) |  |  | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Terlaksanannya koordinasi forum pimpinan | |  |  |  | 1 dok | 9 | 1 dok | 9 | 1 dok | 9 | 1 dok | 9 | 1 dok | | 9 | |  | Kec. Pslb |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | Peningkatan kapasitas dan fasilitas perdesaan (T-3) | Meningkatnya pengelolaan sumberdaya lokal (S-5) |  |  | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Terlaksananya pembinaan tata pemerintahan desa | |  |  |  | 1 dok | 3 | 1 dok | 3 | 1 dok | 3 | 1 dok | 3 | 1 dok | | 3 | |  | Kec. Pslb |
|  |  |  | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Terlaksananya pembinaan pengelolaan keuangan dan aset desa | |  |  |  | 1 dok | 3 | 1 dok | 3 | 1 dok | 3 | 1 dok | 3 | 1 dok | | 3 | |  | Kec. Pslb |
|  |  |  |  |  | Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | Peningkatan kapasitas dan fasilitas perdesaan (T-3) | Meningkatnya pengelolaan sumberdaya lokal (S-5) |  |  | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | Terlaksananya pembinaan BPD | |  |  |  | 1 dok | 3 | 1 dok | 3 | 1 dok | 3 | 1 dok | 3 | 1 dok | | 3 | |  | Kec. Pslb |
|  |  |  |  | Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | Meningkatnya pengelolaan sumberdaya lokal (S-5) |  |  | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Terlaksanannya asistensi apb desa | |  | 1 dok | 4.824 | 1 dok | 5 | 1 dok | 5 | 1 dok | 5 | 1 dok | 5 | 1 dok | | 5 | |  | Kec. Pslb |
|  | Meningkatnya pemenuhan prasarana dasar perdesaan (S-6) |  |  | Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan | Terfasilitasinya pembangunan kawasan yang ideal | |  |  |  | 1 dok | 3 | 1 dok | 4 | 1 dok | 5 | 1 dok | 5 | 1 dok | | 5 | |  | Kec. Pslb |
|  | Peningkatan kapasitas dan fasilitas perdesaan (T-3) | Meningkatnya pemenuhan prasarana dasar perdesaan (S-6) |  |  | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Terciptanya ketenteraman dan ketertiban | |  |  |  | 1 dok | 3 | 1 dok | 4 | 1 dok | 5 | 1 dok | 5 | 1 dok | | 5 | |  | Kec. Pslb |
|  |  |  |  |  | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | Peningkatan kapasitas dan fasilitas perdesaan (T-3) | Meningkatnya pengelolaan sumberdaya lokal (S-5) |  |  | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Terlaksananya musrenbang desa | |  |  |  | 1 dok | 6 | 1 dok | 6 | 1 dok | 6 | 1 dok | 6 | 1 dok | | 6 | |  | Kec. Pslb |
|  |  |  |  |  | Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | Peningkatan kapasitas dan fasilitas perdesaan (T-3) | Meningkatnya pemenuhan prasarana dasar perdesaan (S-6) |  |  | Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa | Terfasiitasinya penegasan batas desa | |  |  |  | 1 dok | 3 | 1 dok | 3 | 1 dok | 3 | 1 dok | 3 | 1 dok | | 3 | |  | Kec. Pslb |
|  |  |  |  |  | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |
|  | Peningkatan kapasitas dan fasilitas perdesaan (T-3) | Meningkatnya pemenuhan prasarana dasar perdesaan (S-6) |  |  | Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | Terlaksananya pengawasan pembangunan kawasan desa | |  | 1 dok | 2.718 | 1 dok | 3 | 1 dok | 5 | 1 dok | 7 | 1 dok | 7.5 | 1 dok | | 7.5 | |  | Kec. Pslb |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | 1,689.67 | | 2,215.23 | | 2,012.73 | | 2,067.73 | | 2,139.98 | | | 2139.975 | |  | |  |

**BAB IV**

**PENUTUP**

Pada Tahun 2020 pandemic covid-19 yang secara global melanda dunia dan sejak akhir Tahun 2019 hingga saat ini. Pandemi covid-19 berimbas negative pada semua lini kehidupan. Ada beberapa Negara yang sudah dapat mengatasi laju perkembangan pandemic di negaranya namun secara global banyak negara yang belum berhasil mengatasinya. Indonesia salah satu negara yang masih berkutat mengatasi pandemic ini, syukur secara global negara-negara sudah mulai dalam tahap tindak lanjut mengatasinya dengan pemberian vaksin kepada warganya.

Pada prinsipnya pandemic ini sudah memperlambat laju pergerakan ekonomi, pendidikan, hingga timbulnya masalah-masalah sosial langsung atau tidak langsung. Demikian pula dengan peberian layanan pada masyarakat yang menjadi tugas utama pemerintah sedikit banyaknya berdampak pula. Fokus utama pelayanan pemerintahan adalah bagaimana mengatasi pandemic tersebut dan ekses langsung atau tidak pada semua sendi kehidupan.

Pada hakekatnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pasilambena merupakan pertanggungjawaban dari kinerja camat yang telah dicapai tahun sebelumnya atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mengelola Sumber Daya Manusia serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Camat terhadap penggunaan anggaran yang telah digunakan untuk kegiatan selama kurung waktu satu tahun baik yang bersifat fisik maupun non fisik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pasilambena Anggaran ini dapat dikatakan ***SANGAT BERHASIL*** atau ***97,69%*** penggunaan anggaran pada Tahun 2022*,* dimana hal ini dapat dilihat pada tabel di depan.

Adapun dampak dan manfaat dari pelaksanaaan dan kegiatan dimaksud masih berupa data kuantitatif pada akhirnya akan merujuk pada kualitatif, hal adalah imbas positif dari mulai bersinerginya bagian-bagian dalam organisasi pemerintahan Kecamatan Pasilambena.

Secara khusus pembiayaan anggaran operasional yang diperlukan sangat mempengaruhi dalam pencapaian kinerja yang optimal, hal ini dapat dilihat dari hasil kinerja kebijakan teknis, program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Instansi Kecamatan Pasilambena pada Tahun Anggaran masih ada sebagian yang belum terselesaikan. Hal tersebut tidak lepas dari kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, baik dalam segi teknis maupun non teknis operasional. Optimalisasi dari anggaran yang digunakan utuk mencapai hasil maksimal seperti yang tergambar dari realisaasi presentase fisik keuangan anggaran tahun 2022.

Di masa depan diharapkan seluruh program dan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh kecamatan yang juga merupakan tugas pelimpahan wewenang yang diberikan harus disertai dengan dukungan dana dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar sehingga sasaran sebagaimana tercantum pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar dapat tercapai.

Latokdok, 2 Februarii 2023

Camat Pasilambena

**ANDI IRWAN, S.P.d, MM**

Pangkat : Pembina/ IV.a

NIP. : 198204132006041015

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**